Contextual Teaching and Learning

A.T Sugeng Priyanto
Djaenudin Harun
Anang Priyanto
Cholisin
Muchson A.R

# Pendidikan Kewarganegaraan




BUKU SEKOLAH bse ELEKTRONIK

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Kelas IX
Edisi 4

Untuk SMP

Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama Kelas IX

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

**Contextual Teaching and Learning**

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

## Kelas IX Edisi 4

Penulis : A.T Sugeng Priyanto
Djaenudin Harun
Anang Priyanto
Cholisin
Muchson A.R
Dadang Sundawa
Rr. Nanik Setyowati
Ilustrasi, Tata Letak : Direktorat Pembinaan SMP
Perancang Kulit : Direktorat Pembinaan SMP

Buku ini dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP

Ukuran Buku : 21 x 30 cm

370.11P
CON Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan: Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas IX Edisi 4/A.T Sugeng Priyanto,…[et. al.].--Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Iv, 138 hlm.: ilus. ; 30 cm.
Bibliografi: hlm. 131-133
Indeks.
ISBN
1. Pendidikan Kewarganegaraan-Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Harun, Djaenudin III. Priyanto, Anang IV. Cholisin
V. A.R, Muchson VI. Sundawa, Dadang VII. Setyowati, Rr. Nanik

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2008

# KATA SAMBUTAN

Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini.

Buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai buku pelajaran di SMP. Sekolah diharapkan dapat menggunakan buku pelajaran ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kebermaknaan pembelajaran. Pada akhirnya, para siswa diharapkan dapat menguasai semua Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar secara lebih mendalam, luas serta bermakna, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Saran perbaikan untuk penyempurnaan buku pelajaran ini sangat diharapkan. Terimakasih setulus-tulusnya disampaikan kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pelajaran ini, baik pada saat awal pengembangan bahan ajar, ujicoba terbatas, maupun penyempurnaan sehingga dapat tersusunnya buku pelajaran ini. Terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku pelajaran ini.

Jakarta, Juli 2008

Direktur Pembinaan SMP

# Pendahuluan

Ketersediaan buku yang bermutu merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya hasil belajar peserta didik. Sehubungan dengan maksud itu, buku ini menyajikan uraian materi pembelajaran guna mendukung pencapaian komptensi dasar dan standar komptensi.

Penyajian uraian materi pembelajaran didukung dengan pembelajaran yang bersifat kontekstual, utamanya terkait dengan berbagai kenyataan yang terjadi di masyarakat. Adapun sistematika buku ini meliputi : kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, tujuan pembelajaran, peta materi, uraian materi setiap bab, latihan, refleksi, rangkuman, dan evaluasi. Pada bagian akhir, buku ini dilengkapi juga dengan glosarium dan indeks.

Buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered), yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Penyajian dalam buku ini berusaha untuk mengembangkan interaksi antara buku dengan peserta didik, dengan bahasa yang komunikatif dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dengan pendekatan yang demikian, peserta didik hendaknya mengikuti langkah-langkah kegiatan belajar sebagai berikut. Pertama, pahamilah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kedua, pahamilah dengan baik uraian materi pembelajaran dalam setiap bab pada buku ini. Ketiga, kerjakan tugas-tugas latihan serta evaluasi yang diberikan, baik yang diberikan pada setiap bab maupun pada bagian akhir buku ini.

Selamat belajar, semoga berhasil dengan baik.

# Daftar Isi


Kata Pengantar ..... iii

Pendahuluan ..... v

Daftar Isi ..... vi

**BAB 1**
PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA ..... 1

A. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara ..... 2

B. Bentuk-bentuk Usaha Pembelaan Negara ..... 15

C. Peran Serta dalam Usaha Pembelaan Negara ..... 24

**BAB 2**
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ..... 37

A. Otonomi Daerah ..... 39

B. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik ..... 58

**BAB 3**
DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA ..... 69

A. Pengertian dan Pentingnya Globalisasi bagi Indonesia ..... 70

B. Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional di Era Global ..... 75

C. Dampak Globalisasi Terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara ..... 94

**BAB 4**
PRESTASI DIRI ..... 101

A. Prestasi Diri Bagi Keunggulan Bangsa ..... 102

B. Hubungan Potensi Diri dan Prestasi Diri Untuk Berprestasi Sesuai Kemampuan ..... 104

c. Peran Serta dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi Diri Sesuai Kemampuan demi Keunggulan Bangsa ..... 113

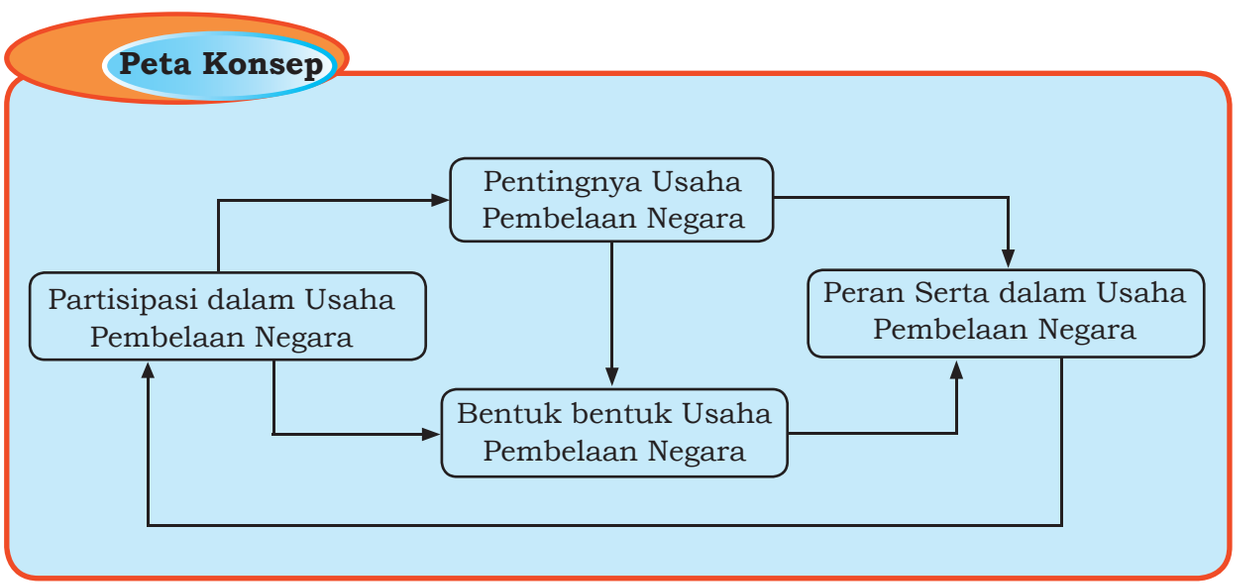
Daftar Pustaka ..... 131
Glosarium ..... 134
Indeks ..... 138

Bab
1

# PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai anak bangsa dan warga negara kalian perlu memiliki kemampuan partisipasi dalam usaha pembelaan negara. Kemampuan ini sangat penting agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta dapat melakukan fungsinya yakni mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan NKRI sangat mulia, yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan kalian masing–masing, berarti kalian telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Partisipasi kalian ini dapat menunjang usaha NKRI dalam mewujudkan tujuan bernegara dan menjaga kelangsungan hidupnya.

**Peta Konsep**




**Kata Kunci :** Peran Serta, Usaha Pembelaan Negara, Bentuk –bentuk Pembelaan Negara.

Selanjutnya dengan mempelajari materi partisipasi dalam upaya pembelaan negara ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, dan menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara. Sedangkan bahan pelajaran yang dikembangkan dalam menunjang kemampuan tersebut, dapat digambarkan pada diagram atau peta konsep.

## A. PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA

Pada bagian ini kalian diajak untuk mempelajari pentingnya usaha pembelaan negara. Materi ini penting dipahami agar setiap warga negara memiliki pemahaman, kesadaran, dan kemauan berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara.

### 1. Pengertian Usaha Pembelaan Negara

Pernahkah kalian melihat atau meraba wujud negara? Tentu kalian sulit melihat atau meraba wujud negara, karena negara bersifat abstrak *(in abstracto)*. Namun demikian, untuk mengetahui wujud negara dapat kita telusuri dari unsur-unsur negara seperti penduduk, wilayah, pemerintah, dan pengakuan. Unsur-unsur itulah yang mesti kita bela.

Dalam UUD 1945 tidak dijelaskan pengertian usaha pembelaan negara. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut bukan ”usaha pembelaan negara” tetapi digunakan istilah lain yang mempunyai makna sama yaitu ”upaya bela negara”. Dalam penjelasan tersebut ditegaskan, bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian upaya bela negara, apakah kalian pernah ikut serta dalam usaha pembelaan negara? Apabila kalian pernah ikut serta menjaga wilayah negara termasuk wilayah lingkungan sekitar dari gangguan atau ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara berarti kalian sudah berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Sikap hormat terhadap bendera, lagu kebangsaan, dan menolak campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan NKRI juga menunjukkan suatu sikap dalam usaha pembelaan negara.



***Gambar 1***
*PAHLAWAN TANAH TANDUS. Elan Wukak Victor (63 tahun), dari Nusa Tenggara Timur berhasil mengubah tanah tandus 21 ribu hektar di Kecamatan Loura, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi hutan jati dan lamtoro. Sumber : TEMPO, 24 -30 Desember 2007*

Dengan demikian pengertian usaha pembelaan negara tidak terbatas memanggul senjata, tetapi meliputi berbagai sikap dan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, misalnya dengan usaha untuk mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan energi, keamanan ekonomi. Misalnya, yang telah dilakukan Elan Wukak Victor, dari Nusa Tenggara Timur merupakan usaha pembelaan negara dalam bentuk keamanan lingkungan, seperti tampak pada Gambar 1.

## 2. Usaha Pembelaan Negara Penting Dilakukan

Pernahkah kalian memiliki barang yang diganggu atau akan diambil alih orang lain yang tidak berhak? Apakah kalian berusaha membela atau mempertahankannya? Pasti kalian mempertahankannya bukan? Setiap manusia normal secara naluriah pasti akan selalu melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari ganguan orang lain. Lebih-lebih jika sesuatu itu sangat disenangi, sangat penting, dan sangat berharga bagi kalian.

Hal lain yang sangat penting bagi kehidupan kita adalah negara. Pada dasarnya setiap orang membutuhkan suatu organisasi yang disebut negara. Apa yang akan terjadi jika tidak ada negara? Thomas Hobbes pernah melukiskan kehidupan manusia sebelum adanya negara yaitu ”manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya” *(Homo Homini Lupus)* dan ”perang manusia lawan manusia” *(Bellum Omnium Contra Omnes)*. Dengan demikian, jika tidak ada negara pasti tidak akan ada ketertiban, keamanan, dan keadilan.

Supaya hidup tertib, aman, dan damai maka diperlukan negara. Negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh setiap warga negaranya. Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negaranya. Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, diantaranya yaitu:

a. untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman;
b. untuk menjaga keutuhan wilayah negara;
c. merupakan panggilan sejarah;
d. merupakan kewajiban setiap warga negara.

Alasan-alasan pentingnya usaha pembelaan negara tersebut dapat dihubungkan dengan pertama, teori fungsi negara, kedua, unsur-unsur negara, ketiga, aspek sejarah perjuangan bangsa (merupakan panggilan sejarah), dan keempat, peraturan perundang-undangan tentang kewajiban membela negara. Kaitan hal – hal tersebut dapat disimak pada uraian berikut ini.

## 3. Fungsi Negara dalam Kaitannya dengan Pembelaan Negara

Para ahli merumuskan fungsi negara secara berbeda-beda. Perbedaan itu tergantung pada titik berat perhatian latar belakang perumusan tujuan negara serta dipengaruhi oleh pandangan atau ideologi yang dianut suatu negara atau ahli tersebut. Seorang ahli bernama Miriam Budiardjo menyatakan, bahwa setiap negara, apapun ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yaitu:

a. Fungsi penertiban *(law and order)*. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.

b. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara.

c. Fungsi Pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan.

d. Fungsi keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Ke empat fungsi tersebut merupakan fungsi minimum, yang berarti fungsi negara tersebut bisa berkembang lebih luas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai negara. Jadi fungsi negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan negara karena keduanya saling berkaitan, sehingga para ahli seringkali menggandengkan tujuan dengan fungsi negara.

**Kerja Individual**

Kalian baca Pembukaan UUD 1945 dan tulis kembali tujuan NKRI, kemudian kemukakan pendapat kalian mengenai fungsi NKRI. Tugas ini bersifat individual, hasilnya dipresentasikan di kelas.

Bagaimana keterkaitan fungsi negara dengan usaha pembelaan negara? Pada dasarnya fungsi-fungsi negara tersebut berkaitan dengan usaha pembelaan negara. Salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi jaminan kelangsungan hidup negara adalah fungsi pertahanan negara. Fungsi pertahanan negara dimaksudkan terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar. Oleh sebab itu harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan perlengkapannya. TNI terdiri atas TNI-AD, TNI-AU, dan TNI-AL.







***Gambar 2***
*ALUTSISTA. Kendaraan Panser TNI-AD, F 16 TNI-AU, Kapal Cepat TNI AL Kelas Pandrong, KRI Todak Sumber : PT. Pindad, 2008, dan www.tni.mil.id/ patriot/200606.*

Perlengkapan TNI dikenal dengan sebutan alat utama sistem senjata (Alutsista) seperti tampak pada Gambar 2.

Fungsi pertahanan negara tidak bisa dipisahkan dengan pembelaan terhadap negara sebagaimana ditegaskan dalam UU RI Nomor 3 tahun 2003 bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara" (Pasal 9 ayat 1). Hal ini mengandung makna, bahwa partisipasi warga negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara merupakan wujud upaya pembelaan negara.

Selain fungsi pertahanan, fungsi lain yang juga sangat penting dalam upaya pembelaan negara adalah fungsi keamanan (ketertiban) yaitu untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi keamanan tersebut di negara kita dibentuk lembaga yang kita kenal dengan POLRI.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi negara yang sangat penting untuk memelihara ketertiban dan menjamin kelangsungan hidup atau tetap tegaknya negara adalah fungsi pertahanan dan ketertiban (keamanan). Untuk mewujudkan fungsi pertahanan dan keamanan, selain negara harus memiliki alat-alat pertahanan dan keamanan, juga diperlukan keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

Dengan demikian, keikutsertaan segenap warga negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan negara berkaitan dengan upaya membela negara.

Fungsi pertahanan dan keamanan negara merupakan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan negara dan merupakan prasyarat bagi fungsi-fungsi lainnya. Hal itu karena negara hanya dapat menjalankan fungsi-fungsi

lainnya jika negara mampu mempertahankan diri dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Pentingnya fungsi pertahanan dan keamanan dalam kehidupan negara dapat diibaratkan pada kehidupan pribadi sehari-hari kita. Apakah kalian bisa belajar dengan tenang atau tidur dengan nyenyak apabila tidak mampu menangkal dan mempertahankan diri dari gangguan atau ancaman yang dihadapi? Jadi jika ingin belajar dengan tenang, nyaman dan konsentrasi, maka diperlukan kemampuan untuk menangkal berbagai gangguan dan ancaman yang dihadapi.

Demikian pula dalam organisasi negara, fungsi pertahanan dan keamanan sangat penting karena negara tidak akan dapat mensejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, menegakkan keadilan, dan lain-lain jika tidak mampu mempertahankan diri terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam.



***Gambar 3***
*Polisi siap menjalankan fungsi keamanan. Sumber : www.www.tnial.mil.id*

Hal ini mengandung arti bahwa untuk mempertahankan dan megamankan negara bukan hanya kewajiban TNI dan POLRI, tetapi juga merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia termasuk kalian sebagai siswa yang sekaligus juga sebagai warga negara Indonesia. Coba renungkan apa yang telah kalian lakukan untuk mengamankan lingkungan sekolah atau tempat tinggal kalian!

## Mari Diskusi

Diskusikan dengan teman sebangku:

a. Mengapa TNI selalu bersiap siaga dengan senjata di tangan ?
b. Mengapa TNI memerangi setiap ancaman bersenjata ?
c. Mengapa Polisi selalu muncul ketika terjadi kerusuhan, tawuran antar pelajar/ kampung atau peristiwa-peristiwa lain yang meresahkan masyarakat?

Hasil diskusi tersebut kemudian presentasikan dalam diskusi kelas.



***Gambar 4***
*Pertamina merupakan BUMN yang menjalankan perniagaan yang dilakukan negara, untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negara juga untuk keamanan energi. Sumber : don85.files.word press.com*

Sedangkan fungsi kesejahteraan dan kemakmuran dijalankan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan dan perniagaan. Fungsi pelayanan atau jasa yaitu seluruh aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara, yang meliputi antara lain pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, kesehatan, pendidikan, dan program-program pembangunan lainnya.

## 4. Unsur-Unsur Negara

Suatu organisasi dalam masyarakat baru dapat dikatakan negara apabila telah memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam suatu negara. Unsur-unsur apakah yang harus dipenuhi untuk dapat disebut negara?

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di Kota Montevideo, bahwa suatu negara harus mempunyai unsur-unsur : a) penduduk yang tetap, b) wilayah tertentu, c) pemerintah, dan d) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Sedangkan Oppenheim-Lauterpacht berpandangan, bahwa unsur-unsur pembentuk (konstitutif) negara adalah a) harus ada rakyat, b) harus daerah, dan c) pemerintah yang berdaulat. Selain unsur tersebut ada unsur lain yaitu adanya pengakuan oleh negara lain (deklaratif). Berkaiatan dengan upaya pembelaan negara, salah satu sasaran yang penting dan mesti dibela oleh pemerintah dan setiap warga negara adalah wilayah negara. Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya pembelaan negara.

Wilayah NKRI terbentang sangat luas dan terdiri atas beribu-ribu pulau. Keberadaan pulau-pulau terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga seringkali menimbulkan konflik perbatasan yang mengganggu dan mengancam keutuhan wilayah negara

kita. Seperti lepasnya Sipadan dan Ligitan dari wilayah negara RI. Juga terjadinya konflik perbatasan antara negara kita dengan Malayasia di Blok Ambalat Kalimantan Timur.

## Mari Diskusi

Lakukan diskusi kelompok. Kelas dapat dibagi menjadi 3-5 kelompok atau lebih. Masalah yang didiskusikan sebagai berikut :

a. Jika fungsi pertahanan negara (angkatan perang) tidak dikendalikan oleh negara, kemungkinan yang akan terjadi adalah ...
   Alasan .....

b. Jika fungsi keamanan dan ketertiban (kepolisian) tidak dikendalikan oleh negara, kemungkinan yang akan terjadi adalah ...
   Alasan .....

c. Jika fungsi keadilan tidak dikendalikan oleh negara, kemungkinan yang akan terjadi adalah ...
   Alasan .....

d. Jika fungsi kesejahteraan dan kemakmuran tidak dikendalikan oleh negara, kemungkinan yang akan terjadi adalah ...
   Alasan .....

Kemudian kalian buat kesimpulan singkat tentang pentingnya pelaksanaan fungsi essensial dikendalikan oleh negara dan presentasikan di kelas.

Dilihat dari posisinya, negara kita dikelilingi oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua besar yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Kondisi dan posisi seperti ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif bagi pertahanan dan keamanan negara kita.

Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial dan keutuhan wilayah negara, diperlukan alat pertahanan dan keamanan negara didukung oleh peran aktif dan loyalitas setiap warga negara. Karena pentingnya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka UUD 1945 menegaskan, bahwa keikutsertaan setiap warga negara dalam mempertahankan, mengamankan dan membela negara merupakan hak dan sekaligus kewajiban.

Berdasarkan kasus-kasus dan posisi wilayah negara kita seperti di atas, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara sesuai dengan posisi dan kemampuannya masing-masing.

Kalian sebagai siswa berkewajiban untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dan sekolah masing-masing dari berbagai ancaman dan gangguan yang dihadapi.




***Gambar 5***
*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hakhaknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A, UUD 1945). Sumber : www.lib.utexas.edu*

Dalam kaitannya dengan konsep upaya pembelaan negara, keempat unsur negara tersebut memiliki keterkaitan dan kedudukan yang sangat penting. Unsur penduduk (dalam arti warga negara) merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Warga negara (dalam posisinya masing-masing) memiliki peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.




***Gambar 6***
*Partisipasi TNI dalam Pasukan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).*
*Sumber: Dephan, 2003*

Unsur pemerintah yang berdaulat memiliki posisi sangat penting baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana kebijakan. Pemerintah mengkordinasikan kegiatan pertahanan dan keamanan negara dalam upaya pembelaan terhadap negara. Pemerintah yang dilengkapi TNI dan POLRI merupakan komponen uta-

ma dalam pertahanan dan keamanan negara yang selalu siap siaga menghalau setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Sedangkan unsur wilayah merupakan merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya pembelaan negara. Keterlibatan Indonesia secara aktif dalam menjamin stabilitas dan perdamaian dunia telah ditunjukkan melalui pengiriman pasukan perdamaian ke sejumlah negara yang dilanda konflik. Keterlibatan TNI dalam pasukan PBB telah dimulai sejak tahun 1957 dengan mengirimkan Kontingen Garuda (KONGA-I) ke Mesir dengan kekuatan 559 pasukan.

## 5. Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Dilihat dari aspek sejarah perjuangan bangsa, masyarakat Indonesia telah membuktikan dirinya yang selalu berpartisipasi dan manunggal dengan aparat pertahanan dan keamanan dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pembinaan rasa kebangsaan itu telah dirintis sejak kebangkitan nasional tahun 1908 yang kemudian dipertegas pada tahun 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda, dan akhirnya diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Partisipasi warganegara da-lam pembelaan negara dapat dilihat dengan dibentuknya berbagai organisasi rakyat untuk pembelaan negara seperti kelaskaran, barisan cadangan, pasukan gerilya desa (pager desa), mobilisasi pelajar (mobpel), organisasi keamanan desa (OKD), organisasi perlawanan rakyat (OPR), dan pembentukan Hansip, Wanra, dan Kamra. Hal ini menunjukkan, bahwa keikutsertaan segenap warga negara dalam pembelaan negara merupakan panggilan sejarah yang wajib dilakukan oleh kita semua sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemilik negara, dan sebagai bagian dari negara. Camkan ucapan almarhum Presiden John F. Kennedy yang masih terdengar di museum–museum Amerika disamping.

”JANGAN TANYA APA YANG TANAH AIRMU DAPAT MEMBERI KEPADAMU, TETAPI TANYAKANLAH APA YANG KAMU DAPAT BERIKAN KEPADA TANAH AIRMU”
(”Ask not what your country can do for you. But ask what you can do for your country”)

## Mari Diskusi

Lakukan diskusi dengan teman sebangku dan presentasikan di kelas mengenai :

a. Bagaimana komentar kalian terhadap ucapan **John F. Kennedy** tersebut di atas, apakah masih relevan dengan keadaan sekarang?

b. Kemukakan contoh-contoh sikap atau perbuatan yang mengutamakan kepentingan negara, contoh yang mengutamakan kepentingan pribadi/ golongan kemudian tuliskan dalam tabel di bawah ini.

| Contoh perbuatan yang mengutamakan kepentingan negara | Contoh perbuatan yang mengutamakan kepentingan pribadi/ golongan |
|---|---|
| 1). ..... | 1). ..... |
| 2). ..... | 2). ..... |
| 3). ..... | 3). ..... |
| dst. | dst. |

**Inkuiri Nilai**

*Sudahkah kamu melakukan sesuatu perbuatan yang menunjang pembangunan Indonesia?*

Sudah semestinya agar setiap warga negara dapat memberikan pengabdiannya kepada negara dalam mewujudkan ketahanan nasional, perlu diwujudkan kesejahteraan atau kemakmuran yang relatif merata. Relatif merata artinya warga yang kaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kemakmuran yang telah dicapai. Sedangkan yang miskin dapat menaikan taraf kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Dengan demikian tidak terjadi kesenjangan yang tajam yaitu si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Pada sisi lain, keamanan dan stabilitas juga sangat penting. Oleh karena itu, baik warga negara maupun pemerintah harus bersama – sama dan saling menunjang dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan stabilitas sehingga ketahanan nasional dapat diwujudkan. Dalam hal ini tokoh nasional Ruslan Abdul Gani (1979) menyatakan **" Tidak akan terjadi stabilitas tanpa ada kemakmuran, dan tidak akan terjadi kemakmuran tanpa keamanan"**. Oleh karena itu menurut Kusnanto Anggoro (2003) ketahanan nasional tidak hanya terbatas pada keamanan dalam arti militer, tetapi juga keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan energi, dan keamanan ekonomi. Para petani dan nelayan merupakan pahlawan karena kerja keras mereka memberikan sumbangan yang besar bagi keamanan pangan nasional. Meskipun kita ketahui bersama kesejahteraan mereka masih memprihatinkan, tetapi semangat pengabdiannya

untuk kemakmuran bangsa sangat besar. Pelaksanaan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila merupakan jaminan terwujudnya peningkatkan sejahteraan umum yang merupakan faktor penting bagi ketahan nasional.

Negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tekad tersebut kemudian dinyatakan dengan tegas dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa "negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata-kata "segenap bangsa" dapat diartikan seluruh warga negara Indonesia yang meliputi rakyat dan pemerintah. Sedangkan "tumpah darah Indonesia" dapat dimaknai sebagai tanah air (wilayah) Indonesia.

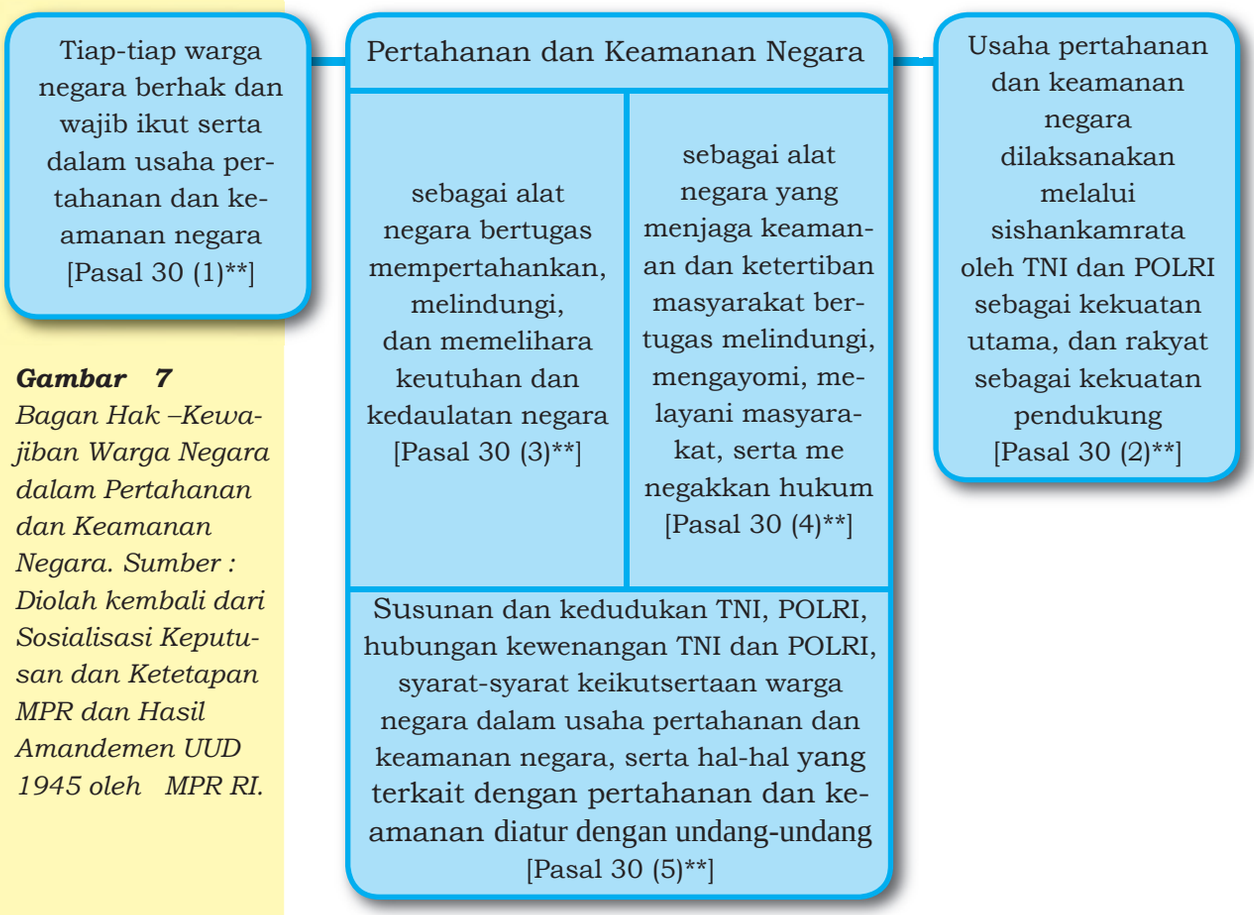
## 6. Landasan Hukum tentang Kewajiban Membela Negara

Dilihat dari perundang-undangan, kewajiban membela negara dapat ditelusuri dari ketentuan dalam UUD 1945 dan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) ditegaskan bahwa " tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung".

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut, ada beberapa hal yang mesti kita pahami yaitu 1) keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan **hak** dan **kewajiban**; 2) pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta; 3) kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah POLRI; 4) kedudukan

rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung. Ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara dan sebagai kekuatan pendukung dapat dilihat pada gambar 7.

Konsep yang diatur dalam Pasal 30 tersebut adalah konsep pertahanan dan kemanan negara. Sedangkan konsep bela negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) bahwa " Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Ikut serta pembelaan negara tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara, sebagaimana ditegaskan dalam UURI Nomor 3 tahun 2002 , Pasal 9 ayat (1) bahwa " Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Kemudian dalam UU RI Nomor 3 tahun 2002 bagian menimbang huruf (c) ditegaskan antara lain "dalam penyelenggaraan




***Gambar 7***
*Bagan Hak –Kewajiban Warga Negara dalam Pertahanan dan Keamanan Negara. Sumber : Diolah kembali dari Sosialisasi Keputusan dan Ketetapan MPR dan Hasil Amandemen UUD 1945 oleh MPR RI.*

pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara...".

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk memepertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2002). Dengan demikian, jelaslah bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan dalam keikutsertaannya pada segala usaha untuk memepertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kata "wajib" yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) dan UURI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) mengandung makna, bahwa setiap warga negara, dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Namun demikian, di negara kita sampai saat ini belum ada keharusan untuk mengikuti wajib militer (secara masal) bagi segenap warga negara Indonesia seperti diberlakukan di beberapa negara lain. Sekalipun demikian, adakalanya orang-orang yang memiliki keahlian tertentu (biasanya sarjana) yang dibutuhkan negara dapat diminta oleh negara untuk mengikuti tes seleksi penerimaan anggota TNI sekalipun orang tersebut tidak pernah mendaftarkan diri.

## B. BENTUK BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA

Seperti telah dikemukakan pada bagian di atas, bahwa usaha pembelaan negara sangat penting untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan berbagai ancaman terhadap bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara perlu memahami berbagai bentuk usaha pembelaan negara dalam rangka melaksanakan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

## 1. Bentuk Penyelenggaraan Usaha Pembelaan Negara

Persoalan kita sekarang adalah bagaimana wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara? Menurut Pasal 9 ayat (2) UURI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui:

a. Pendidikan kewarganegaraan;

b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib; dan

d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, siswa yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dapat dikatakan telah ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Salah satu materi/bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 37 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Persoalan yang hendak kita telusuri adalah mengapa usaha pembelaan negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewaganegaraan?

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UURI Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan, bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan.

Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan dengan makna upaya bela negara. Perhatikan kalimat "...dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan RI ..." pada definisi upaya bela negara yang telah diungkapkan di atas. Kalimat kecintaan kepada negara kesatuan RI merupakan realisasi dari konsep

nasionalisme (rasa kebangsaan) dan cinta tanah air (patriotisme). Sedangkan kecintaan kepada tanah air dan kesadaran berbangsa merupakan ciri kesadaran dalam bela negara. Konsep bela negara adalah konsepsi moral yang diimplementasikan dalam sikap, perilaku dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan bela negara, pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk membina kesadaran peserta didik ikut serta dalam pembelaan negara.

Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan negara. Pendidikan kewarganegaraan mendapat tugas untuk menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai dan perilaku demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) atau UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Bela Negara. Memasuki organisasi resimen mahasiswa merupakan hak bagi setiap mahasiswa, namun setelah memasuki organisasi tersebut mereka harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Misalnya, sampai tahun 2003 jumlah resimen Mahasiswa sekitar 25.000 orang dan alumni resimen mahasiswa sekitar 62.000 orang. Anggota resimen mahasiswa tersebut merupakan komponen bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan bisa didayagunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Disamping mahasiswa, para pemudapun dapat melakukan kegiatan latihan dasar bela negara, seperti yang dilakukan BPK (Barisan Pemuda Kutai).

## Mari Diskusi

Berdasarkan uraian sebelumnya, diskusikan hal-hal berikut. Melalui apa saja pembinaan kesadaran bela negara ditanamkan kepada siswa dan mahasiswa? Mengapa demikian? Dan apakah kesadaran bela negara kalian dapat tumbuh melalui pendidikan kewarganegaraan?

### 2. Pengabdian sebagai Prajurit TNI



TNI -AU



TNI -AD



TNI -AL



POLRI

Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka dewasa ini telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan peran dan fungsi TNI (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) dan POLRI. POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, POLRI berperan dalam bidang keamanan negara, sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan negara. Dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk :

a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
c. melaksanakan operasi militer selain perang;
d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Pasal 10 ayat (3) UURI Nomor 3 Tahun 2002).

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah, bahwa TNI merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002).

Sedangkan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Gambar 9 merupakan salah satu bukti upaya bela negara yang dilakukan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman.



***Gambar 8***
*Para anggota Laskar Barisan Pemuda Kutai saat melakukan latihan fisik dibawah instruktur dari Kodim 0906/TGR. Sumber: KutaiKartanegara.com*

Jika demikian, apakah hanya TNI yang memiliki tugas menghadapi berbagai ancaman? Hal ini tergantung pada jenis ancaman yang dihadapi. Jika jenis ancaman yang dihadapi berbentuk ancaman militer, maka Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan apabila yang dihadapi ancaman non-militer, maka unsur utamanya adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.



***Gambar 9***
*TNI Rampungkan Latgab Pasukan Khusus, 200 personel Detasemen Bravo Pasukan Khas (Den Bravo Paskhas, TNI AU), Detasemen Jala Mengkara (Den Jaka, Marinir TNI AL) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD, di Batam. Sumber:http://alutsista.blogspot.com*

Menurut penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk antara lain:

a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa;

b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial;

c. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;

d. sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membayakan keselamatan bangsa;

e. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan teorisme dalam negeri;

f. pemberontakan bersenjata;

g. perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Jelas di sini, bahwa penanggulangannya diutamakan secara militer, apabila langkah-langkah diplomasi menemui jalan buntu.



***Gambar 10***
*Operasi KRI Karel Satsuit Tubun di Wilayah perairan Ambalat, Kalimantan Timur. Klaim Malaysia atas Blok Ambalat, sempat menimbulkan konflik perbatasan dengan militer Malaysia, karena merupakan ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI. Sumber : TEMPO, eidisi khusus kilas balik 2005.*

Contoh potensi ancaman militer, misalnya pernah dicontohkan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu antara lain mengatakan, Indonesia harus mewaspadai berbagai potensi ancaman dari beberapa negara tetangga. Beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, Australia dapat menganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lepasnya Sipadan-Ligitan, dan perseteruan di Blok Ambalat, merupakan contoh betapa Malaysia dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Dari sisi Singapura, permasalahan batas negara yang belum jelas dapat membuat Negeri Singa itu memperluas wilayahnya ke Indonesia terkait kepentingannya dalam pengamanan di Selat Malaka. Belum lagi Singapura selama ini merupakan tempat yang empuk untuk pencucian uang. Adapun Australia, hingga saat ini terus melakukan pembangunan kekuatan yang mengarah ke utara, terhadap lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan pemberlakuan kebijakan sepihak (pre-emptive) konsep Penentuan Wilayah Laut Australia (Australian Maritime Indentification Zone atau AMIZ), memperkuat adanya ancaman militer terhadap Indonesia.

Kemudian dalam Departemen Pertahanan (2003) diungkapkan, bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu kekuatan nasional negara *(Instrument of national power)*, disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Dalam tugasnya, TNI melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi. Sedangkan OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian.



***Gambar 11***
*Partisipasi TNI dalam melakukan tugas bantuan dan tugas kemanusiaanan/ selain perang. Sumber : Dephan,2003*

Hal ini berberda jika ancaman yang dihadapi bersifat non-militer (non tradisional) seperti perdagangan narkotik dan obat terlarang lainnya. Dalam ancaman jenis ini segenap warga negara memiliki peranan penting untuk menunaikan kewajiban dalam pembelaan negara sesuai kedudukan dan profesinya masing-masing. Misalnya seorang siswa atau guru dan warga negara lainnya berkewajiban untuk melaporkan perdagangan narkotik dan obat terlarang lainnya jika dia mengetahui hal tersebut. Sedangkan polisi berkewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kasus tersebut. Demikian pula jaksa dan hakim masing-masing berkewajiban melakukan proses peradilan terhadap pelaku kasus itu. Sedangkan TNI dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk turut serta menangani permasalahan tersebut.

Dephan memperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di masa datang, meliputi :

a. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.

b. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari

Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

c. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

d. Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.

e. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.

f. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.

g. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan/perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.

h. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.

i. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.

j. Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.



***Gambar 12***
*Berbagai masalah di perbatasan membuat TNI akan memprioritaskan pengadaan persenjataan menghadapi ancaman di wilayah perbatasan. Sumber : i223.photobucket.com*

## 3. Pengabdian Sesuai dengan Profesi

Yang dimaksud pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya (penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi

beberapa profesi tersebut terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan/atau memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya yaitu antara lain petugas PMI, para medis, tim SAR, POLRI, dan petugas bantuan sosial.

Disamping itu kita juga mengenal LINMAS (Perlindungan Masyarakat). Linmas merupakan organisasi perlindungan masyarakat secara suka-rela, yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memper-kecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Keanggotaan perlindungan masyarakat (Linmas) tersebut me-rupakan salah satu wujud penyeleng-garaan upaya bela negara.



***Gambar 13***
*Tim SAR Jateng dan sejumlah warga Berupaya mengevakuasi keluarga korban banjir sungai Bengawan Solo yang menggengai 21 desa Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sumber : Kompas, 12 Maret 2008.*

Dengan demikian, warga negara yang berprofesi para medis, tim SAR, PMI, POLRI, petugas bantuan sosial, dan Linmas memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan tugas keprofesiannya masing-masing. Kelompok masyarakat yang mempunyai profesi seperti itu seringkali berpartisipasi dalam menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam yang sering terjadi di wilayah negara kita.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa setiap warga negara sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Siswa dan mahasiswa ikut serta membela negara melalui pendidikan kewarganegaraan; anggota resimen mahasiswa melalui pelatihan dasar kemiliteran; TNI dalam menanggulangi ancaman militer dan non-militer tertentu; POLRI termasuk warga sipil lainnya dalam menangulangi ancaman non- militer; dan kelompok profesi tertentu dapat ikut serta membela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Untuk mengatasi ancaman non-militer perlu adanya keamanan atau ketahanan lingkungan, energi, pangan, dan ekonomi,

maka pengabdian bela negara melalui profesi terbuka sangat luas. Misalnya, para petani dan nelayan melakukan upaya bela negara melalui pengabdiannya terutama untuk keamanan pangan. UKM (Usaha Kecil Menengah) dan para pengusaha besar melakukan upaya bela negara melalui pengabdiannya terutama untuk keamanan ekonomi.



***Gambar 14***
*Petani menampi gabah yang baru saja di panen di tepi jalan Ciwastra-Kota Bandung Jawa Barat, dan Nelayan Pantai Sadeng – Gunung Kidul DIY. Petani dan Nelayan di seluruh Nusantara mereka mengabdi terutama untuk keamanan pangan nasional. Sumber : Kompas, 31/3; 3/4 -2008.*

Kemudian para warga negara yang bergelut bidang energi melakukan pengabdian untuk keamanan energi. Begitu pula yang menekuni bidang lingkungan melakukan pengabdiannya untuk keamanan lingkungan. Ketika semua warga negara mengabdikan diri sesuai dengan profesi dalam usaha pembelaan negara, maka tentu saja akan meningkatkan ketahanan nasional kita.

## C. PERAN SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA

### 1. Contoh Tindakan Usaha Pembelaan Negara

Keikutsertaan setiap warga negara dalam usaha pembelaan negara bukan hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi. Tingkatan kewajiban tersebut bervariasi sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing. Uraian berikut akan disajikan contoh-contoh tindakan upaya membela negara dari masing-masing komponen bangsa.

Upaya membela negara yang paling nampak diperankan oleh TNI sejak perang kemerdekaan sampai

masa reformasi saat ini. Contoh-contoh tindakan upaya membela negara yang dilakukan TNI antara lain menghadapi ancaman agresi Belanda, menghadapi ancaman gerakan federalis dan separatis APRA, RMS, PRRI/PERMESTA, Papua merdeka, separatis Aceh (GSA), melawan PKI, dan DI/TII. Demikian pula POLRI telah melakukan upaya membela negara terutama yang berkaitan dengan ancaman yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kerusuhan, penyalahgunaan narkotika, konflik komunal, dan sebagainya. Hal-hal tersebut jika dibiarkan akan menggangu keselamatan bangsa dan negara.

Sekarang mari kita kaji contoh-contoh tindakan yang menunjukkan upaya membela negara yang dilakukan warga negara selain TNI dan POLRI. Dilihat dari aspek historis perjuangan bangsa kita, terdapat beberapa contoh tindakan usaha pembelaan negara yang dilakukan komponen rakyat diantaranya:

a. Kelaskaran yang kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan pada periode perang kemerdekaan ke-I
b. Pada periode perang kemerdekaan ke-II ada organisasi Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisasi pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan dari barisan cadangan;
c. Pada tahun 1958 – 1960 muncul oganisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan bentuk kelanjutan Pager Desa;
d. Pada tahun 1961 dibentuk Pertahanan sipil, perlawanan rakyat, Keamanan rakyat sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD/ OPR
e. Perwira Cadangan yang dibentuk sejak tahun 1963.
f. Kemudian berdasarkan UURI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (telah diganti dengan UURI Nomor 3 Tahun 2002) ada organisasi yang disebut Rakyat Terlatih dan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Selain itu, terdapat pula tindakan upaya membela negara yang dilakukan secara berencana melalui organisasi profesi, seperti antara lain Tim SAR untuk mencari dan menolong korban bencara alam, PMI, dan para medis. Demikian pula menteri luar negeri dan utusannya yang memperjuangkan kasus Sipadan dan Ligitan merupakan contoh tindakan membela negara (keutuhan dan kedaulatan negara). Silahkan kalian baca kronologis "Lepasnya Pulau Sipandan dan Ligitan dari NKRI" .



***Gambar 15*** *Pulau Sipadan. Sumber : Tempo.co.id*

**LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN DARI NKRI**

**Inkuiri Nilai**

*Tunjukkan sikap yang sesuai dengan usaha pembelaan negara?*

Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau kecil yang luasnya 23 hektar. Pulau Ligitan terdiri dari semak belukar dan pohon. Sementara itu, Sipadan merupakan pucuk gunung merapi di bawah permukaan laut dengan ketinggian sekitar 700 meter. Sampai 1980-an, dua pulau ini tak berpenghuni.

Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya arti penting, yakni batas tegas antardua negara. Sengketa pemilik Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah terjadi sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Pulau Sipadan pernah dimasukkan dalam Peraturan tentang Perlindungan Penyu *(Turtle Preservation Ordinance)* oleh pemerintah Inggris pada 1917. Keputusan ini ditentang pemerintah Hindia Belanda yang merasa memiliki pulau tersebut. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda, meski gejolak bisa teredam. Sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul ke permukaan pada 1969. Sayang, tak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus

ini kembali mengambang. Pemerintah Indonesia - Malaysia akhirnya sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (MI) pada tahun 1997. Dalam putusan MI yang jatuh pada 17 Desember 2002, Indonesia dinyatakan kalah. Untuk menghadapi sengketa ini Indonesia sampai menyewa lima penasihat hukum asing dan tiga peneliti asing untuk membuktikan kepemilikannya.

Sayang, segala upaya itu mentah di depan 17 hakim MI. Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, kata Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda berdasarkan pertimbangan efektivitas (effectivitee), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan peraturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an. Pemerintah Indonesia menyatakan rasa kecewa yang mendalam bahwa upaya yang dilakukan oleh empat pemerintahan Indonesia sejak tahun 1997.

Namun, kita berkewajiban untuk menghormati Persetujuan Khusus untuk bersama-sama mengajukan sengketa kedua pulau ini ke MI pada 31 Mei 1997. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini sebenarnya peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pulau-pulau kecil yang berserakan. Indonesia memiliki 17.506 pulau. Sebagian pulau sudah berpenghuni dan bernama. “Tapi masih banyak yang kosong dan tidak punya nama,”. Yang paling mengkhawatirkan tentu saja pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain.

**Sumber :** Diolah kembali dari Tempo.co.id dan TEMPO INTERAKTIF Negara Berpagar Belasan Ribu Pulau 08 Maret 2005 | 21:18 WIB 2005

Selain melalui kegiatan organisasi profesi, tindakan upaya membela negara dapat dilakukan melalui sekolah (khususnya melalui PKN) misalnya pembinaan sikap dan prilaku nasionalisme, patriotisme, dan membela kebenaran dan keyakinan pada Pancasila dan UUD 1945.

Demikianlah beberapa contoh sederhana yang menunjukkan tindakan upaya bela negara. Tentu saja masih banyak contoh lain. Silakan mencari contoh lain terutama yang berkaitan dengan ancaman non-tradisional (non-militer) yang dihadapi bangsa dan negara kita saat ini.

## Kerja Kelompok

Diskusikan dengan teman sebangku dan hasilnya dipresentasikan tentang masalah:

a. Apakah dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukan usaha pembelaan negara bangsa Indonesia lemah ?

b. Berikan beberapa contoh tindakan usaha pembelaan negara yang dapat dilakukan siswa dan masyarakat? Untuk memudahkan, rumuskan dalam bentuk tabel seperti berikut.

Contoh usaha pembelaan negara yang dapat dilakukan siswa dan masyarakat

| SISWA | MASYARAKAT |
|---|---|
| 1). ..... | 1). ..... |
| 2). ..... | 2). ..... |
| 3). ..... | 3). ..... |
| dst. | dst. |

## 2. Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara di Lingkungan

UURI Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan, bahwa pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan (Pasal 5) Sedangkan yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Misalnya, cermati gambar peta di bawah ini yang memperlihatkan kabupaten di wilayah nusantara yang merupakan daerah perbatasan dan terluar yang rawan dari berbagai ancaman. Ancaman di Sabang (no.3) juga merupakan ancaman di Merauke (no.26) dan daerah yang lain.




***Gambar 16***
*Kabupaten Perbatasan dan Terluar Wilayah NKRI. Sumber : Koran Tempo, Februari 2005.*

Merujuk ketentuan tersebut, maka keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat di mana kita berdomisili. Artinya menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. (ingat konsep/prinsip Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional).

Persoalannya, siapa yang mesti berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara di lingkungannya? Dan bagaimana bentuk partisipasi yang dapat dilakukannya?



***Gambar 17***
*Hansip sebagai kekuatan rakyat. Sumber: i267.photobucket.com*

Pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan serta ketertiban wilayah sekitarnya mulai dari lingkungan rumah sendiri, lingkungan masyarakat sekitar, sampai lingkungan wilayah yang lebih luas.

Adapun bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungannya antara lain melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan masal, dan konflik komunal. Bencana alam terutama banjir tampak telah menjadi bencana nasional, karena hampir seluruh wilayah nusantara terkena

bencana tersebut. Oleh karena itu, perlu ada gerakan bersama untuk menguranginya. Misalnya dengan gerakan membuat serapan air sebanyak mungkin di lingkungan kita masing – masing. Membuat serapan air dengan teknologi sederhana biopori ternyata mudah, murah dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Lokasi untuk membuat serapan juga tidak membutuhkan tanah yang luas. Untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan Gambar 18.



***Gambar 18***
*LUBANG PENYERAP AIR. Kamir R. Brata memperkenalkan Biopori, yaitu lubang berdiameter 10-20 cm dengan kedalaman 1 meter, untuk menyerap air. Temuan ini lebih efektif daripada sumur resapan. Sumber : TEMPO, 24 – 30 Desember 2007*

Dalam masyarakat kita terdapat organisasi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat yaitu Perlindungan Masyarakat (Linmas). Linmas mempunyai fungsi untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

Selain itu terdapat pula organisasi rakyat yang disebut Keamanan Rakyat (Kamra), Perlawanan Rakyat (Wanra), dan Pertahanan Sipil (Hansip). Keamanan rakyat merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Wanra merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Kemudian Hansip merupakan kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa.

Di daerah Bali terdapat lembaga atau organisasi keamanan yang dibentuk berdasarkan adat yang dikenal dengan nama Pecalang. Pecalang memiliki kewibawaan dan sangat berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan setempat.

Partisipasi dan kegiatan–kegiatan seperti yang tampak pada gambar 19, merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi keutuhan lingkungan dan keselamatan

warga masyarakat dari segala bentuk ancaman, yang tidak lain merupakan tujuan pertahanan negara.

Sedangkan partisipasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara dapat diwujudkan dalam tindakan upaya bela negara. Dengan demikian, partisipasi warga negara dalam membela lingkungan tidak lain merupakan bagian dari usaha pembelaan negara.



***Gambar 19***
*Pecalang yang dimiliki oleh setiap desa adat di Bali. Sumber, Kompas, 7 Desember 2003.*

Salah satu sasaran yang mesti dibela oleh setiap warga negara adalah wilayah negara. Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya bela negara. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara sesuai dengan posisi dan kemampuannya masing-masing. Kalian sebagai siswa SMP berkewajiban untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya masing-masing dari berbagai ancaman dan gangguan yang dihadapi.

## Refleksi

Setelah kalian mempelajari seluruh rangkaian materi pembelajaran "Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara" dalam bab ini, cobalah kalian kemukakan pendapatmu berkenaan dengan hal – hal berikut .

1. Apakah kalian dapat menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara?
2. Apakah kalian dapat menunjukan bentuk – bentuk usaha pembelaan negara ?
3. Apakah kalian dapat menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara?
4. Berikan komentarmu terhadap materi pembelajaran "Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara" yang kalian pelajari !

Untuk mengingatkan kembali apa yang telah kalian pelajari, bacalah rangkuman.

## Rangkuman

Setiap warga negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman dan ganguan. Oleh karena itu usaha pembelaan negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara.

Mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang sangat penting dalam kaitannya dengan usaha pembelaan negara.

Setiap negara mesti menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu: 1) melaksanakan penertiban, 2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3) fungsi pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dsari luar, dan 4) menegakkan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Rakyat sebagai salah satu unsur mutlak suatu negara, memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berbagai aspek kehidupan. Untuk itu setiap warga negara memiliki jaminan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan negara. Salah satu hak dan kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya bela negara sebagaimana diatur UU No. 3 tahun 2002 diselenggarakan melalui: a) pendidikan kewarganegaran; b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c) pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib; dan d) melalui pengabdian sesuai dengan profesi.

## Evaluasi

**I. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat. Berilah tanda X pada jawaban yang dipilih.**

1. Pengertian upaya pembelaan negara, adalah ...
   a. pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
   b. pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
   c. sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
   d. sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. Berikut ini merupakan alasan tentang pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, kecuali ...
   a. untuk menjaga keutuhan wilayah negara.
   b. untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman.
   c. merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.
   d. merupakan kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari negara.

3. Fungsi negara yang terutama berkaitan langsung untuk mewujudkan tujuan NKRI ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, adalah ...
   a. pertahanan.
   b. kebebasan.
   c. keadilan.
   d. kesejahteraan dan kemakmuran.

4. Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban membela negara bagi setiap warga negara, kecuali ...
   a. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.
   b. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
   c. UU RI No. 3 Tahun 2002.
   d. UU RI No. 20 Tahun 2003.

5. Berikut ini, merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara (ancaman bersifat non tradisional), kecuali ...
   a. agresi militer
   b. penyelundupan.
   c. penangkapan ikan secara ilegal.
   d. perdagangan narkotika dan obat terlarang.

6. Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya

pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui ...
a. Pendidikan Kewarganegaraan.
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
c. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib.
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

7. Para Nelayan dan Petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui ...
a. Pendidikan Kewarganegaraan.
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
c. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib.
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

8. Berikut ini merupakan perbuatan yang nyata dapat dilakukan para siswa dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masing–masing, kecuali ...
a. menjaga lingkungan rumah , sekolah dan masyarakat agar tetap bersih dan sehat.
b. tidak menjadi pengguna narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau aparat keamanan apabila melihat adanya penjualan atau pemakainya.
c. membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelaian sebagai wujud kesetiakawanan.
d. tidak menonton tayangan TV yang berupa sadisme, sronok, dan situs internet porno dan bacaan lain yang tidak bermoral.

9. Cinta bangsa (nasionalisme) yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara antara lain contohnya ...
a. mengutamakan penggunaan barang – barang produk dalam negeri karena dapat menggerakan roda perekonomian .
b. lebih baik membeli barang luar negeri daripada membuat sen-diri karena ongkosnya lebih mahal.
c. menganggap derajat bangsanya yang paling unggul sedangkan derajat bangsa lain rendah.
d. lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru – meniru bangsa lain.

10. Organisasi keselamatan masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam dan memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta adalah ...
a. Linmas
b. Wanra
c. Kamra
d. Hansip

## II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Kemukakan beberapa alasan pentingnya usaha pembelaan negara?
2. Jelaskah perbedaan fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan?
3. Jelaskan mengapa setiap warga negara memiliki kewajiban ikut serta membela negara?
4. Sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara?
5. Tentukan apakah tindakan seperti dalam tabel di bawah termasuk contoh tindakan yang menunjukkan upaya pembelaan negara atau tidak, caranya dengan memberikan tanda V pada kolom “ya” atau “tidak” dan tulis alasannya.

| Tindakan | Ya | Tidak | Alasan |
|---|---|---|---|
| 1. mendamaikan konflik antar etnis | | | |
| 2. ikut kampanye anti narkoba | | | |
| 3. demonstrasi anti KKN | | | |
| 4. menggalang solidaritas membantu sesama anak bangsa yang terkena musibah bencana alam | | | |
| 5. memelihara kelestarian alam. | | | |

Bab
2

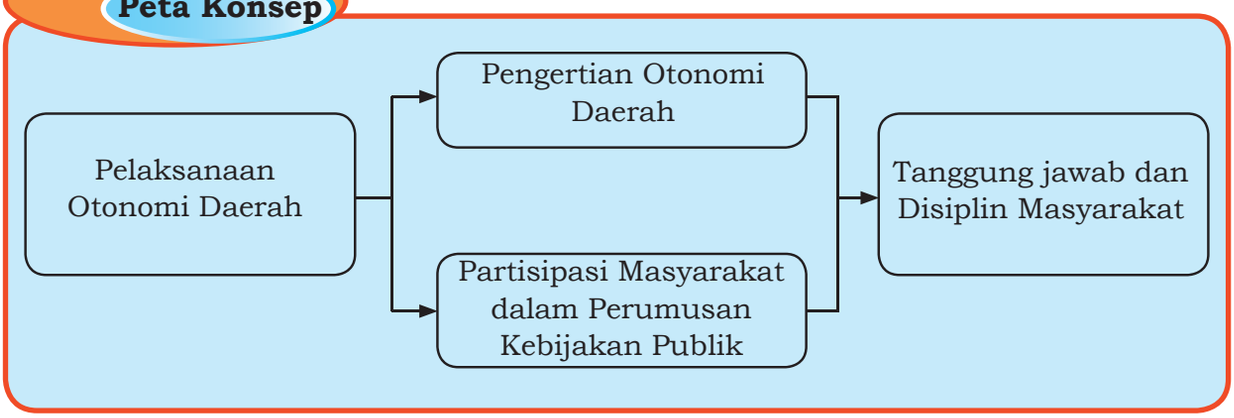
# PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara garis besar uraian pada bab ini terangkum dalam peta konsep dibawah ini :

**Peta Konsep**




**Kata Kunci :** *Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Desentralisasi; Dekonsentrasi; Tugas Pembantuan; Otonomi Daerah; Daerah Otonom; Wilayah Administrasi; Instansi Vertikal; Pejabat yang Berwenang; Kecamatan; Kelurahan; dan Desa, Kebijakan Publik, Partisipasi.*



***Gambar 1***
*Bentangan wilayah pantai dalam Otonomi Daerah dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sumber: www.tropicalisland.de*

Sebagai contoh dalam kehidupan rumah tangga ada pembagian tugas diatur anggota keluarga.

Pembagian tugas antar anggota keluarga mendorong lahirnya rasa tanggung jawab dalam diri setiap anggota keluarga. Tumbuhnya rasa tanggung jawab akan menumbuhkan sikap disiplin dalam setiap melaksanakan kewenangan yang diperolehnya.

Dengan demikian setiap anggota keluarga akan mengembangkan potensi yang ada dan dimilikinya secara optimal dengan disertai rasa tanggung jawab.

Pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang pelaksanaan otonomi daerah, yang meliputi pengertian otonomi daerah dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah, dan menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kalian juga diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan hakikat kebijakan publik, dan mampu menguraikan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, serta mampu menganalisis dampak yang akan terjadi manakala tidak ada keaktifan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

# A. OTONOMI DAERAH

## 1. Hakikat Otonomi Daerah



***Gambar 2***
*Istana Merdeka sebagai tempat penyelenggaraan Pemerintah Pusat. Sumber: http://thamrin.files.wordpress.com*

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan kalian untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.



***Gambar 3***
*Kantor Gubernur Jabar sebagai salah satu contoh tempat penyelenggaraan Pemerintah Provinsi. Sumber : http://buletin.melsa.net.id*

Agar istilah-istilah tersebut dapat kalian kuasai dengan baik, kalian dapat mempelajarinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. DPRD adalah Badan legislatif daerah



***Gambar 4***
*Kantor Bupati Tabalong sebagai salah satu tempat penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten. Sumber : http:// www.tabalong.go.id*



***Gambar 5***
*Kantor Kecamatan Bukut Raya Pekanbaru. Sumber : http: //i195.photo bucket.com*



***Gambar 6***
*Kantor Kepala Desa Babadan Boyolali. Sumber : id.wikipedia.org*

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.

Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desentralisasi adalah transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta.

Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu :

1. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat
2. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien
3. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana
4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.




*Analisa mengapa Otonomi daerah diperlukan dalam pengembangan suatu daerah di Indonesia?*

Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. yang akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah.

Diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah, ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah. Kewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan penilai.

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu : Politik, Ekonomi serta Sosial dan Budaya.

Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Gejala yang muncul dewasa ini partisipasi masyarkat begitu besar dalam pemilihan Kepala Daerah, baik propinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini bisa dibuktikan dari membanjirnya calon-calon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa konsep otonomi daerah mengandung makna :

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan pemerintah pusat yang bersifat strategis nasional.
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah; menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah.
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur (budaya) setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas (kepercayaan) yang tinggi.
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan.
5. Peningkatan efeisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara.
6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi pusat yang bersifat *block grant.*
7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial.

**Inkuiri Nilai**

*Apakah dengan otonomi daerah, pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan?*




***Gambar 7***
*Sekalipun daerah mempunyai potensi yang berbeda, namun tetap menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa*

## Kerja Individual dan Kelompok

Berdasarkan uraian di atas, silahkan kalian rumuskan bahwa hakikat otonomi daerah adalah .....
.....

Diskusikan bersama teman teman sebangku mengapa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya otonomi daerah?
.....
.....

### 2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan.
4. Pemerataan.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## 3. Asas-asas dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang asas-asas pemerintahan daerah, silahkan cermati terlebih dahulu bagan di bawah ini !

**SKEMA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH**




***Sumber :*** *Bahan sosialisasi hasil-hasil perubahan UUD 1945*

Bagan tersebut merupakan aturan tentang pemerintahan daerah yang dimuat pada pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari bagan di atas dapat kita sarikan sebagai berikut.

1. Adanya pembagian daerah otonom yang bersifat berjenjang, Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
2. Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Secara eksplisit tidak disinggung mengenai asas dekonsentrasi;
4. Pemerintah daerah otonom memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis;
5. Kepala daerah dipilih secara demokratis;
6. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Bagian ini kita akan membicarakan tentang asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun sebelum itu, ada baiknya kalian pahami dulu beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah, yaitu antara lain pemerintahan daerah, pemerintah daerah, otonomi daerah, dan daerah otonom.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah adalah Gubernur (untuk provinsi), Bupati (untuk kabupaten), Walikota (untuk Kota) dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah kalian mengetahui arti beberapa istilah di atas, mari kita bahas asas-asas apa yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dalam pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa "pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Dengan demikian terdapat dua asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi dalam ketentuan tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Sedangkan asas tugas pembantuan dimaksudkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa (Penjelasan UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004).



Berdasarkan uraian diatas, asas otonomi sering disebut asas desentralisasi.

Apa yang dimaksud desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah (Pusat) kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32 Tahun 2004).

Perlu kalian ingat, bahwa sekalipun daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sen-

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali: kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, termasuk kewenangan yang utuh dalam hal perencanaan, pelaksanaa, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah

Otonomi bertanggungjawab adalah berupa per wujudan pertanggung jawaban sebagai kon-sekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi



diri, tetapi tetap berada dalam bingkai dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pemerintah daerah berkewajiban untuk patuh dan menghormati kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat.

Asas yang kedua adalah tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah (Pusat) kepada daerah dan/atau desa, dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi urusan pemerintahan dalam tugas pembantuan bukan merupakan atas inisiatif dan prakarsa sendiri tetapi merupakan penugasan dari pemerintah yang ada di atasnya.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan diberikannya otonomi daerah, pemerintahan daerah dituntut lebih kreatif dan inisiatif menggali dan memanfaatkan segenap potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (UUD 1945 pasal 18 ayat (6).

Adapun prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan asas desntralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota,
3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten; Daerah Kota, dan Desa.

**Mari Diskusi**

Mengapa daerah tidak diberi kewenangan dalam pelaksanaan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama? Jelaskan dampak positif dan negatifnya kebijakan tersebut? Jawablah pertanyaan tersebut setelah kalian diskusikan dengan temanmu satu bangku.

## 4. Kewenangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam susunan pemerintahan di negara kita ada Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, serta Pemerintahan Desa. Masing-masing pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierakhis. Dalam UUD Negara Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)]. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)].

Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat dijelaskan, bahwa:

1. Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat hierarkhis;
2. Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
3. Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya;
5. Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal



**Interpretasi**

*Bagaimana pendapatmu tentang pelayanan publik di era Otonomi daerah dewasa ini.*

18A ayat (2) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.

Kewenangan provinsi diatur dalam Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi meliputi :
   a. perencanaan dan pengendalian pembangunan
   b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengwasan tata ruang
   c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
   d. penyediaan sarana dan prasarana umum
   e. penanganan bidang kesehatan
   f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
   g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
   h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
   i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
   j. pengendalian lingkungan hidup
   k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
   l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
   m. pelayanan administrasi umum pemerintahan
   n. pelayanan administrasi penanaman modal, termasuk lintas kabupaten/kota
   o. penyelenggraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan
   p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan

Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam pasal 14 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengwasan tata ruang
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
d. penyediaan sarana dan prasarana umum
e. penanganan bidang kesehatan
f. penyelenggaraan pendidikan
g. penanggulangan masalah sosial
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
j. pengendalian lingkungan hidup
k. pelayanan pertanahan
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. pelayanan administrasi penanaman modal,
o. penyelenggraan pelayanan dasar lainnya dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

## Mari Diskusi

Diskusikan dengan teman dalam kelompok hal-hal sebagai berikut :

1. Mengapa adanya otonomi, daerah dapat membuat program sesuai kebutuhannya tanpa campur tangan pemerintah pusat?
2. Mengapa adanya otonomi, daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

## 5. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah

Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

Pasal 40 UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu pasal 41 menyatakan, bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kedudukannya seperti itu, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, yang meliputi pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap Raperda, serta hak anggota DPRD untuk mengajukan Raperda. Fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangannya dalam hal anggaran daerah (APBD). Sedangkan fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Bagaimana cara pemilihan anggota DPRD? dalam pasal 18 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan, bahwa ”pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD waktu pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPD.

### Kerja Individual

**Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di kertas kerjamu.**

1. Bagaimana hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah?
2. Jelaskan fungsi DPRD!

a. Tugas dan Wewenang DPRD

Adapun tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
b. membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPR kabupaten/kota;
e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
h. menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

b. Hak DPRD

Selain itu DPRD juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, yaitu hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud di atas adalah dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Dalam melaksanakan hak angket dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

c. Hak Anggota DPRD

Selain DPRD sebagai lembaga yang mempunyai berbagai hak, maka anggota DPRD juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, yaitu mengajukan rancangan Peraturan Daerah; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; membela diri; imunitas; protokoler dan keuangan serta administratif.

d. Kepala Daerah

Dilihat dari susunannya, pada pemerintahan daerah terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota dipimpin oleh Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota yang biasa disebut Kepala Daerah memiliki kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing-masing daerah.

Kepala Daerah dan DPRD memiliki tugas/ wewenang dan mekanisme pemilihan yang berbeda.

Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
c. menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan secara demokratis dan transparan. Mekanisme pemilihan kepala daerah dikenal dengan istilah PILKADA langsung. Coba perhatikan ketentuan berikut ini.

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai Wakil Pemerintah. Sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD, sebagai Wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, sedangkan Daerah Kota disebut Walikota yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/ Kota.



***Gambar 8***
*Pelantikan jabatan.*
*Sumber: http://www.kutaikartanegara.com*

Sebagai alat Pemerintah Pusat, Gubernur melaksanakan tugas-tugas antara lain.

a. Membina ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya;
b. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan lintas sektor mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dimaksud
c. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah
d. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan kesatuan bangsa sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah
e. Melaksanakan segala tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya
f. Melaksanakan tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya.

e. Keuangan Daerah

Sumber-sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; Pinjaman Daerah ; dan lain-lain penerimaan yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Hasil Pajak Daerah; Hasil Restribusi Daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari sumber daya alam; Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. Penerimaan Negara dari Bea

Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Sebesar 10% dari penerimaan PBB dan 20% dari penerimaan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk Daerah. Sedangkan penerimaan negara dari pertambangan minyak setelah dikurangi pajak dibagi dengan imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan negara dari sektor gas alam setelah dikurangi pajak dibagikan dengan imbangan 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Daerah.

## Kerja Individual

1. Sebutkan jenis-jenis pajak di daerah kalian yang dipungut oleh pemerintah setempat !
   .....
2. Apa yang dimaksud dengan restribusi daerah, dan sebutkan contohnya yang ada di daerah kalian!
   .....

## Coba Amati

Tanyakan pada orang tua kalian, berapa ukuran luas tanah dan luas bangunan yang dimiliki orang tua kalian! Dan berapa besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar setiap tahunnya?

.....

.....

Tanyakan juga pada Bapak Ketua RT atau RW tentang cara penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan dikenakan pada warga setempat!

.....

.....

## B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

### 1. Hakikat Kebijakan Publik

Kegiatan belajar selanjutnya, coba anda perhatikan ceritera atau kasus di bawah ini secara seksama!

Pak Badrun sebagai kepala keluarga dalam menjalankan roda rumah tangganya telah mengeluarkan kebijakan berupa pembagian tugas-tugas dalam rumahnya. Adapun pendistribusian tugas tersebut adalah sebagai berikut : Ane sebagai anak tertua yang telah berusia 21 tahun diberi tugas berbelanja ke pasar dan memasak pada pagi hari sebelum berangkat ke kampus. Sementara Andre anaknya yang nomor dua dan berusia 17 tahun diberi tugas menyapu halaman rumah dan mengisi bak mandi. Sedangkan si bungsu Ani yang berusia 13 tahun diberi tugas membereskan tempat tidur. Untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas tersebut dipercayakan kepada Ibu Badrun. Sementara Pak Badrun bertugas mencari nafkah.

**Coba Amati**

Berdasarkan gambaran kasus di atas, cermati, apakah kebijakan yang dikeluarkan Pak Badrun termasuk kebijakan publik? Apa ciri-ciri kebijakan publik ? Mengapa kalian menyimpulkan, bahwa kasus tersebut mengandung/tidak mengandung unsur kebijakan publik? Ada baiknya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian bicarakan dengan teman sebangku!

Setelah kalian mendiskusikan masalah-masalah tersebut, sekarang coba cermati uraian berikut ini :

Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga eksekutif, legisltaif dan yudikatif; Birokrasi pemerintahan; Aparat penegak hukum; dan Badan-badan pembuat keputusan publik lain. Dengan demikian semua kebijakan, yang berkaitan dengan hukum manapun, peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang dinamakan kebijakan publik.

Untuk menambah wawasan kalian tentang pengertian kebijakan publik, berikut ini dikutipkan beberapa definisi sebagai berikut :

**Dye :** Kebijakan Publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan

**Kartasasmita :** Kebijakan Publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa yang menyebabkannya (3) apa pengaruhnya

**Edwar III :** Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.

**Anderson :** Kebijakan Publik serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksana kan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu

## Coba Amati

Berdasarkan ke empat definisi tersebut, sekarang silahkan kalian cermati, apa ciri-ciri kebijakan publik !

Ciri-ciri kebijakan publik :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Selanjutnya kalian perhatikan gambar 9, dalam bidang apakah lembaga tersebut mengeluarkan kebijakan publik?



***Gambar 9***
*Gedung Mahkamah Agung. Sumber: www.pgri32.8m.com*

Kebijakan publik yang telah disahkan oleh lembaga berwenang, baik di tingkat pusat (nasional), Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan atau Desa hanya akan menjadi tulisan-tulisan yang tidak bermakna sama sekali, jika tidak diterapkan di masyarakat. Tujuan penerapan kebijakan publik ialah agar sesuatu yang telah digariskan tersebut bukan

hanya bersifat abstrak belaka, namun menjadi suatu yang terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan berbagai komponen, seperti manusia, dana, dan sarana serta prasarananya. Sosialisasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik yang bersifat elektronik, seperti melalui internet, email, TV, dan radio maupun secara manual, misalnya melalui spanduk, selebaran, surat kabar atau dalam bentuk pengumpulan massa dalam suatu tempat.

**Coba Amati**

Coba kalian tanyakan pada Ketua RT/RW?Kepala Desa/Kepala Kelurahan kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang dikeluarkan oleh Ketua RT/RW?Kepala Desa/Kepala Kelurahan !

.....

Bagaimana cara yang dilakukan oleh Ketua RT/RW/Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam merumuskan kebijakan publik tersebut!

.....

Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik tersebut?

.....

## 2. Partisipasi dalam Perumusan Kebijakan Publik




***Gambar 10***
*Merumuskan Kebijakan Publik Tingkat Kecamatan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan. Sumber : www.malang-kab.go.id/*

Untuk turut serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, maka kegiatan yang dapat dilakukan siswa dalam proses pembelajaran ini dapat dilakukan dengan melalui kegiatan Praktik Belajar Kewarganegaraan Berbasis Portofolio

Untuk melaksanakan kegiatan praktek belajar kewarganegraan yang berbasis portofolio, ikuti langkah-langkah sebagai berikut :

a. Perumusan Masalah

Untuk merumuskan masalah langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- Bentuk kelompok kecil dalam kelas dengan jumlah anggota antara 3 sampai 4 orang
- Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan apa

saja yang termasuk katagori kebijakan publik di wilayah kabupaten atau kecamatan anda

- Kemudian inventarisir atau kumpulkan semua permasalahan tersebut, dan tuliskan di papan tulis.
- Setelah itu setiap anggota kelas memilih salah satu permasalahan tersebut dengan cara memberi tanda pagar ( I )
- Kemudian jumlahkan perolehan suara dari masing-masing permasalahan tersebut.
- Apabila jumlah suara yang diperoleh oleh ranking pertama belum mencapai jumlah 50% plus 1, maka selanjutnya diadakan pemilihan tahap 2 untuk mendapatkan satu masalah kelas
- Setelah didapat 1 masalah kebijakan publik (menjadi masalah kelas),

b. Menentukan Sumber Informasi
   - Setelah didapat masalah kelas, selanjutnya tentukan sumber informasi dari masalah yang telah dipilih tersebut, untuk selanjutnya kelas dibagi lagi ke dalam kelompokkelompok sesuai dengan jumlah sumber informasi tersebut. Jadi bila sumber informasi tersebut ada 6, maka kelas dibagi menjadi 6 kelompok.

c. Mencari Informasi
   - Setiap kelompok mengumpulkan data sesuai dengan tugas masing-masing, setelah data diperoleh digabung dengan data yang didapat oleh kelompok lain.

d. Diskusi Hasil Data Lapangan
   - Setelah setiap kelompok mendapat data dari sumber informasi selanjutnya untuk kepentingan klarifikasi data tersebut, diadakan diskusi kelas guru membahas temuan-temuan informasi dari lapangan



***Gambar 11***
*Perumusan masalah didiskusikan dalam kelompok kecil.*
*Sumber : Dokumen CICED*



***Gambar 12***
*Para siswa sedang melakukan pemungutan suara untuk menentukan masalah kelas.*
*Sumber : Dokumen CICED*



***Gambar 13***
*Para siswa sedang mengumpulkan informasi dari berbagai nara sumber. Sumber : Dokumen CICED*



***Gambar 14***
*Diskusi data lapangan.*
*Sumber : Dokumen CICED*



***Gambar 15***
*Penyajian Portofolio.*
*Sumber : Dokumen CICED*



***Gambar 16***
*Dewan Juri saat pelaksanaan show case.*
*Sumber : Dokumen CICED*

e. Pembentukan Kelompok Portofolio

- Selanjutnya kelas kembali dipecah ke dalam 4 kelompok, yaitu:

  Kelompok 1 (satu)

  mendiskusikan dan melaporkan tentang permasalahan dan latar belakang masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik yang ditentukan oleh kelas;

  Kelompok II (dua)

  merumuskan dan menentukan berbagai alternatif pemecahan masalah;

  Kelompok III (tiga)

  menganalisis dan memilih salah satu alternatif dari sejumlah alternatif yang telah dirumuskan kelompok II;

  Kelompok IV (empat)

  merumuskan rencana tindakan, dalam bagaimana langkah-langkah nyata tindakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah kebijakan publik tersebut, termasuk dampak positif dan negatifnya bagi pemerintah dan masyarakat.

f. Pelaksanaan *Show Case*

Setelah semuanya tersusun, baru kemudian ditentukan waktu pelaksanaan *show case* atau penyajian data dan permasalahan yang diteliti. Untuk itu perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Panel atau papan atau kertas karton manila yang berisi data-data sesuai dengan kajian kelompok (ada 4 panel sesuai dengan jumlah kelompok)

b. Tempat atau ruangan untuk pertunjukkan (bisa di kelas aula atau di halaman sekolah)

c. Juri (kalau bisa dari unsur luar sekolah, terutama yang berkaitan dengan

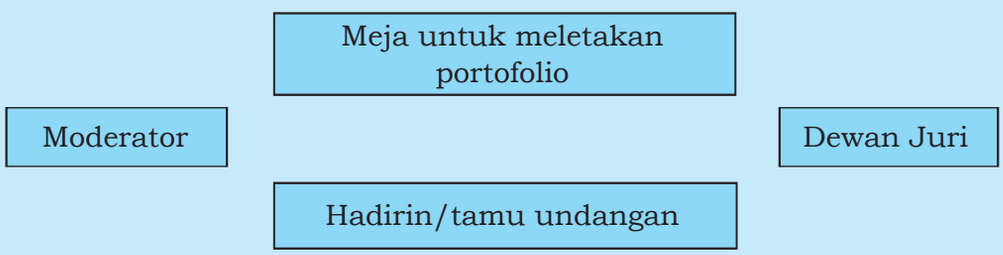
masalah kebijakan publik yang telah ditentukan kelas)

d. Moderator (bisa diambil dari guru Kewarganegaraan yang ada di sekolah tersebut, bisa 1, 2 atau 3 guru sekaligus)

e. *Setting* tempat untuk penyajian

- Setelah semuanya siap, maka acara show case bisa langsung dimulai
- Setelah semua kelompok selesai menyajikan, Dewan Juri mengumpulkan nilai yang diperoleh kelompok

BAGAN
DENAH PENYAJIAN MODEL PEMBELAJARAN PRAKTIK BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PORTOFOLIO




Jadi melalui kegiatan-kegiatan di atas, kalian sebagai siswa SMP telah berpartisipasi secara nyata, bukan hanya mensosialisasikan kebijakan publik kepada masyarakat ketika penampilan hasil kerja lapangan, tetapi juga telah ikut berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan dan merumuskan kebijakan publik tersebut.

Selain melalui kegiatan di atas, masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan kebijakan publik? Silahkan tulis dalam kolom di bawah ini !

## Mari Diskusi

Cara-cara mensosialisasikan kebijakan publik yang bisa dilakukan oleh siswa SMP kelas IX adalah :

.....
.....
.....

### 3. Dampak Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa dengan otonomi daerah, pemerintah daerah beserta seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah tersebut diberdayakan secara optimal. Melalui otonomi daerah, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola daerahnya masing-masing, baik dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat. Ini mengandung makna, bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya masing-masing. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola dan membangun daerah sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di antaranya dapat berupa membayar pajak tepat pada waktunya, melaksanakan berbagai peraturan daerah dan memberikan berbagai masukan dalam berbagai perumusan kebijakan publik yang akan diberlakukan kepada seluruh masyarakat.

Dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik akan berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena mereka dilibatkan secara langsung dalam perumusannya. Jadi tidak ada lagi perasaan atau kesan, bahwa masyarakat tidak setuju atau tidak tahu terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Untuk mewadahi dan memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat, sudah barang tentu diperlukan keterbukaan dari pihak Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keterbukaan di sini dalam arti pihak eksekutif dan legislatif daerah mau mendengarkan, menampung dan merumuskan pendapat atau masukan

masyarakat tersebut dalam kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Jadi bukan hanya sekedar di tampung, tanpa ditindaklanjuti lebih jauh.

Manakala ada keterbukaan dari pihak eksekutif dan legisltaif daerah,maka akan menimbulkan motivasi atau dorongan atau semangat dari masyarakat untuk terus membangun daerahnya dengan cara melaksanakan berbagai aturan yang telah menjadi kebijakan publik

## Coba Amati

1. Seandainya masyarakat tidak mau berpartisipasi secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, dampak apa yang akan terjadi bagi pemerintahan daerah tersebut ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat dengan senang hati berpartisipasi secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak mau berpartisipasi secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik?

Jawablah dalam kertas kerjamu

## Refleksi

Setelah mempelajari bab ini kalian dapat menanggapi hal-hal sebagai berikut.

1. Tuliskan bagian-bagian mana dari bab ini yang belum kalian fahami dan bagian mana yang sudah kallian fahami.
2. Kemukakan pula apa keuntungan dan kerugian pelaksanaan otonomi daerah, bagi daerah yang mempunyai kekayaan berlimpah dan bagi daerah yang kekayaan alamnya kurang.

## Rangkuman

Seiring dengan tuntutan reformasi, sejak lahirnya UU No. dan UU No. 32 dan 33 tahun 2004 daerah-daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal ini berdampak tumbuhnya kreativitas di daerah-daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Dampak lain adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, khususnya dalam pemilihan kepala dearah. Selain itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih transparan. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas.

## Evaluasi

Setelah mempelajari bab ini silahkan kalianmembentuk kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan paling banyak 5 orang. Tugas kelompok adalah mendiskusikan materi-materi mana dari uraian di atas yang paling dikuasai dan materi-materi mana yang kurang dikuasai, berikan juga alasannya!

**I. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat. Berilah tanda X pada jawaban yang dipilih.**

1. Kebijakan otonomi daerah dilatar-belakangi oleh ...
   a. Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
   b. Daerah-daerah lebih kretaif dalam mengembangkan sumber dayanya
   c. Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
   d. Putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya

2. Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah ...
   a. Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004
   b. Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004
   c. Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004
   d. Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004

3. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah ...

a. UU No. 20 tahun 2004
b. UU No. 21 tahun 2004
c. UU No. 32 tahun 2004
d. UU No. 33 tahun 2004

4. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah ...
   a. Propinsi
   b. Kabupaten/Kota
   c. Kota Administratif
   d. Desa

5. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah ...
   a. Presiden, menteri dan gubernur
   b. Presiden,DPR dan menteri
   c. Presiden,dan para menteri
   d. Presiden, ketua DPR,dan Ketua mahkamah Agung

6. Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...
   a. Desentralisasi
   b. Dekonsentrasi
   c. Tugas pembantuan
   d. Otonomi daerah

7. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan ...
   a. Desentralisasi
   b. Dekonsentrasi
   c. Tugas pembantuan
   d. Otonomi daerah

8. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...
   a. Gubernur b. Walikota
   c. Bupati d. DPRD II

9. Perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen di daerah dinamakan ...
   a. Instansi berwenang
   b. Instansi horizontal
   c. Instansi departemen
   d. Instansi vertikal

10. Pemerintah terendah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dinamakan ...
    a. RT b. Desa
    c. RW d. Kecamatan

11. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sadu?
    a. Desentrasisasi politik
    b. Desentarlisasi ekonomi
    c. Desentralisasi administrasi
    d. Desentralisasi hukum

12. Bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah, kecuali :
    a. Politik
    b. Agama
    c. Sosial budaya
    d. Keuangan

13. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah ....
    a. Gubernur
    b. Bupati
    c. Walikota
    d. DPRD Kabupaten

14. Badan eksekutif di daerah kota adalah ...
    a. Gubernur b. Bupati
    c. Walikota d. DPRD II
15. Badan legislatif di kabupaten adalah ...
    a. Gubernur b. Bupati
    c. Walikota d. DPRD II
16. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi, kecuali :
    a. Pekerjaan umum
    b. Kesehatan
    c. Pendidikan
    d. Fiskal
17. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah ...
    a. Sejajar
    b. Lebih tinggi
    c. Lebih rendah
    d. Lembaga otonom
18. Kepala Daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan ...
    a. Kepala daerah
    b. Peraturan daerah
    c. Keputusan daerah
    d. Pengangkatan pejabat daerah
19. Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya ...
    a. 4 tahun b. 5 tahun
    c. 6 tahun d. 10 tahun
20. Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar ...
    a. 10% b. 20%
    c. 80% d. 90%

**II. Kerjakan semua soal dibawah ini secara tepat dan singkat !**

1. Jelaskan perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom!
2. Jelaskan perbedaan kelurahan dan desa!
3. Sebutkan tugas-tugas DPRD Kabupaten/Kota!
4. Sebutkan hak-hak yang dimiliki DPRD Kabupaten/Kota!
5. Sebutkan 3 kewenangan daerah di wilayah laut!

**III. Kemukakan sikap atau pendapat kalian terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan alasannya!**

1. Kebijakan otonomi daerah dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Hanya dengan pelaksanaan kebiakan otonomi daerah yang bertanggung-jawab, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia akan terwujud
3. Otonomi daerah akan mensejahteraan masyarakat daerah
4. Dengan otonomi daerah potensi dan sumber daya alam akan tergali secara maksimal
5. Pelaksanaan otonomi daerah membuat warga yang bukan berasal dari daerah tersebut menjadi resah dan gelisah

Bab
3

# DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Era globalisasi dewasa ini sudah menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap bangsa dan negara, tidak terkecuali Indonesia. Proses interaksi dan saling pengaruh-mempengaruhi, bahkan pergesekan kepentingan antar-bangsa terjadi dengan cepat dan mencakup masalah yang semakin kompleks. Batas-batas teritorial negara tidak lagi menjadi pembatas bagi kepentingan masing-masing bangsa dan negara. Di bidang ekonomi terjadi persaingan yang semakin ketat, sehingga semakin mempersulit posisi negara-negara miskin. Sementara itu dalam bidang politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan terjadi pula pergeseran nilai. Misalnya, globalisasi di bidang politik tampak, bahwa demokrasi dan HAM telah dijadikan oleh dunia internasional untuk menentukan apakah negara tersebut dinilai sebagai negara beradab atau bukan?

Sebelum dilanjutkan cermati peta konsep dibawah ini!

**Peta Konsep**




**Kata Kunci :** Globalisasi, Dampak Globalisasi dan Politik Luar Negeri RI

Setiap bangsa di dunia dewasa ini tidak dapat terlepas satu dengan yang lain. Oleh karena itu satu sama lain harus melakukan kerjasama guna mencapai tujuan bangsa tersebut. Globalisasi merupakan salah satu hal yang harus dihadapi oleh berbagai macam bangsa yang ada di dunia. Pada bab III ini kalian diajak untuk mengkaji berbagai materi globalisasi, sehingga kalian dapat : menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi; mendeskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global; mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa.

## A. PENGERTIAN DAN PENTINGNYA GLOBALISASI BAGI INDONESIA

### I. Pengertian Globalisasi



***Gambar 1***
*Handphone Sumber : www.complains.sg*

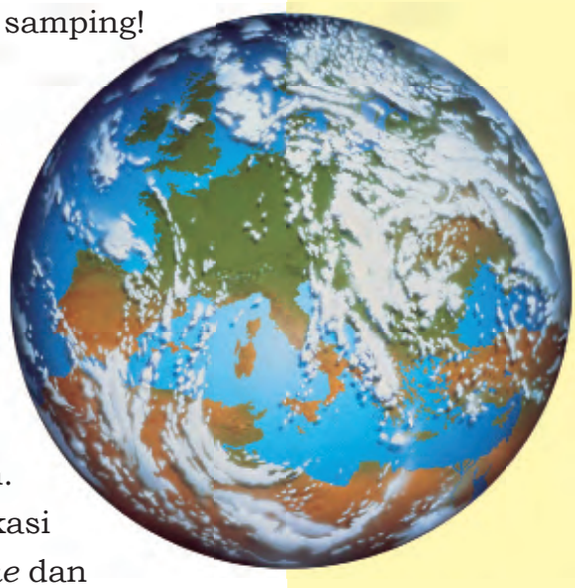
Sebelum mengungkapkan pengertian globalisasi, cobalah kalian mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kalian. Kalian pasti akan menemukan banyak hal. Kalian menemukan banyak orang yang sudah menggunakan telepon genggam, atau bahkan kalian sendiri sudah memegang telepon genggam *(handphone)*.

Cobalah kalian datang ke pasar swalayan, bahkan di penjual buah di pinggir jalan. Anda akan menemukan berbagai macam buah-buahan dari luar negeri. Misalnya ada apel merah dari Washington, anggur merah, kelengkeng, buah pir Cina, pisang Cavendish. Kalau kalian perhatikan sebagian besar semua itu didatangkan dari negara lain. Belum lagi kalau diperhatikan berbagai jenis makanan, kalian akan menemukan *California Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken, Mc Donald's, dan Pizza Hut*. Itu semua baru sekedar sedikit contoh yang dapat diungkap.

Jenis-jenis makanan itu bukan makanan khas Indonesia, namun merupakan jenis makanan yang datang dari negara lain. Masih banyak contoh lain yang kalian dapat mencari dan menemukannya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa arti semua itu ?

Jika kita telusuri lebih jauh, semua gejala tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa masyarakat tempat kita hidup tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kehidupan masyarakat kita yang lebih luas dan besar, yaitu masyarakat dunia. Dari gambaran yang berkenaan dengan alat komunikasi telepon genggam, buah-buahan maupun berbagai jenis makanan tersebut, menandakan, bahwa sesungguhnya kita tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan dengan bangsa atau negara lain. Beredarnya berbagai produk suatu negara di negara lain menandakan, bahwa antara negara satu dengan negara lain di dunia ini berada dalam saling dan saling ketergantungan.

Selanjutnya perhatikan gambar di samping! Cobalah cermati, gambar apakah itu?



***Gambar 2***
*Globe. Sumber: www.google.earth.com*

Jawaban kalian pasti benar, yaitu gambar bola dunia, atau *globe*. Pada nasa kini apa yang terjadi di bagian lain dari belahan dunia ini akan dengan mudah dapat diketahui oleh negara yang ada di belahan dunia lainnya. Apa yang dihasilkan oleh suatu negara akan dengan mudah sampai di negara lain. Semua karena adanya satelit komunikasi dengan melalui *teleconference, hand phone* dan internet serta adanya alat transportasi yang cepat yaitu pesawat udara. Semua itu merupakan beberapa faktor yang mempercepat terjadinya globalisasi. Dari berbagai gambaran di muka kalian dapat merumuskan, apa yang dimaksud dengan globalisasi.

Untuk mencocokkan apakah rumusan kalian benar atau kurang benar, kajilah beberapa pengertian mengenai globalisasi berikut ini.



***Gambar 3***
*Presiden SBY saat berteleconfer-ence dan dialog dengan para pimred Jawa Pos Grup yang berada di Cina, dan Presiden SBY di Hotel Shangrila Surabaya, hari Senin (3/9) malam. (foto: abror/presidensby.info)*
*Sumber : www.jawapos.co.id*

## Kerja Individual

Buatlah rumusan menurut kalimat kalian mengenai pengertian globalisasi. Serahkan hasilnya pada guru.

a. Globaliasi dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia.

b. Globalisasi adalah sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan di antara dan elemen-elemennya yang terjadi akibat dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional.

c. Globalisasi adalah proses, di mana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain.

d. Globalisasi adalah proses meningkatnya aliran barang, jasa, uang dan gagasan melintasi batas-batas negara.

e. Globalisasi adalah proses di mana perdagangan, informasi dan budaya semakin bergerak melintasi batas negara.

f. Globalisasi adalah meningkatnya saling keterkaitan di antara berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, lingkungan, politik, dan pertukaran kebudayaan.

g. Globalisasi merupakan gerakan menuju terciptanya pasar atau kebijakan yang melintasi batas nasional.

Sartono Kartodirjo berpendapat bahwa proses globalisasi sebenarnya merupakan gejala sejarah yang telah ada sejak jaman prasejarah. Beberapa contoh antara lain bangsa-bangsa dari Asia ke Eropa, ke Amerika, dari Asia ke Nusantara, dan lain-lain. Berdasarkan tinjauan sejarah, Indonesia sebenarnya telah lama mengalami proses globalisasi.

Peristiwa-peristiwa dalam sejarah dunia yang meningkatkan proses globalisasi antara lain adalah:

a. Ekspansi Eropa dengan navigasi dan perdagangan.
b. Revolusi industri yang mendorong pencarian pasaran hasil industri.
c. Pertumbuhan kolonialisme dan imperialisme.
d. Pertumbuhan kapitalisme.
e. Pada masa pasca Perang Dunia II meningkatlah telekomunikasi serta transportasi mesin jet.



***Gambar 4***
*Kemajuan Dunia Dirgantara Pasca PD II. Sumber : Dokumen Pribadi*

Kalian pasti juga sudah tahu sekarang ini globalisasi berkembang dalam skala yang luas, dan dipercepat oleh mengalirnya arus informasi secara bebas.

## 2. Pentingnya Globalisasi bagi Indonesia

Sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia pasti tidak dapat dan tidak akan mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Andaikata isolasi diri itu terjadi, sudah dapat dipastikan Indonesia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini artinya apa? Artinya tidak lain bahwa di dalam hubungan internasional terjadi apa yang dinamakan saling hubungan dan saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya.

Globalisasi memang sering digambarkan sebagai sebuah gejala ekonomi, yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional, yang beroperasi melin-

tasi batas-batas wilayah negara. Hal ini mempengaruhi proses produksi dan penyebaran tenaga kerja internasional. Namun sesungguhnya lebih luas dari itu. Sebab selain bidang ekonomi, juga menyangkut bidang politik, sosial dan budaya. Semua bidang itu digerakkan oleh perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang telah mampu meningkatkan kecepatan dan lingkup hubungan antar manusia di seluruh penjuru dunia.

Contoh yang masih sangat aktual adalah, apa yang beberapa waktu yang lalu terjadi di Yogyakarta, tepatnya peristiwa tanggal 27 Mei 2006, yaitu gempa bumi. Dalam waktu sekejap, apa yang terjadi di Yogyakarta tersebut langsung dapat diketahui oleh hampir seluruh manusia yang ada di dunia ini. Contoh lain adalah perebutan piala dunia sepakbola atau cabang olahraga yang lain. Hampir semua mata orang sedunia dapat menyaksikan pertandingan tersebut tanpa harus datang ke negara penyelenggara.



***Gambar 5***
*Kondisi salah satu gedung sekolah di Bantul akibat gempa bumi yang menguncang di Yogya , Bantul, Klaten dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006*
*Sumber : www.detik.com*

Dari beberapa contoh ini kita tahu bahwa globalisasi sesungguhnya telah merambah ke segenap bidang kehidupan kita.

## 3. Apa arti pentingnya globalisasi bagi Indonesia?

Globalisasi memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun yaitu dengan mengambil manfaat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa atau negara lain, untuk diterapkan di Indonesia. Sudah barang tentu tidak semua kemajuan yang dialami bangsa lain akan kita ambil atau kita tiru begitu saja. Indonesia seharusnya hanya akan mengambil kemajuan dari sisi positifnya saja, baik itu kemajuan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun teknologi. Untuk itu nilai-nilai Pancasila harus kita gunakan sebagai penyaring dari nilai yang diambil, karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi dari bangsa Indonesia. Pancasila bersumber dari agama dan adat istiadat yang digali dari bumi Indonesia.

Jika mengambil suatu hal atau barang yang berasal dari luar negeri, tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka yang terjadi adalah kaburnya jati diri bangsa Indonesia. Sesuatu yang moderen memang diperlukan tetapi tidak boleh menghilangkan nilai-nilai yang sudah berakar dalam diri bangsa Indonesia.

**Mari Diskusi**

Diskusikan dalam kelompok kalian hal-hal berikut ini :

Carilah kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga kita maupun negara-negara maju di bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, dan Hankam

Dari contoh-contoh tersebut, coba klasifikasikan, mana yang perlu diambil atau ditiru oleh bangsa Indonesia? Mana yang tidak perlu ditiru oleh bangsa Indonesia?

Agar wawasan kalian menjadi semakin luas, hasil diskusi kelompok tersebut bawalah ke dalam diskusi kelas. Salah satu dari kelompok yang ada yang mempresentasikan dalam diskusi kelas tersebut, sementara kelompok yang lainnya menanggapi hasil diskusi kelompok yang presentasi itu. Hasil diskusi kelas ini berarti merupakan hasil pemikiran bersama kelas kalian.

## B. POLITIK LUAR NEGERI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL

### 1. Arti Politik Luar Negeri

Tahukah kalian, apakah yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan oleh suatu negara dalam forum internasional? Jawabannya tidak lain adalah kepentingan nasional. Sebagai contoh pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Pengiriman mereka adalah dalam rangka mengurangi pengangguran dan menghasilkan devisa bagi Indonesia. Untuk itu dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional harus ada kerjasama dengan Negara tetangga atau Negara dimana para TKI dan TKW dikirimkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri.

Apakah politik luar negeri itu? Secara sederhana politik luar negeri diartikan sebagai skema atau pola dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu berhadapan dengan negara lain atau

sekelompok negara lain. Politik luar negeri merupakan perpaduan dari tujuan atau kepentingan nasional dengan *power* dan kapabilitas (kemampuan).

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu.

Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai "suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional". Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa".

Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.

Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

## 2. Politik Luar Negeri Republik Indonesia

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa .... kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa .... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .....

Dari dua kutipan di atas, jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945.

b. Sejarah Kelahiran Politik Luar Negeri Republik Indonesia yang Bebas Aktif

Peristiwa internasional yang terjadi meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1939, antara dua blok kekuatan. Kedua blok tersebut adalah negara-negara Poros dengan negara-negara Sekutu. Pada awal peperangan kemenangan selalu diraih oleh pihak negara-negara Poros. Bagian dari Perang Dunia II ini yang terjadi di Asia dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Pada awalnya kemenangan Perang Asia Timur Raya ini ada di fihak Jepang, sehingga dalam waktu yang sangat singkat Jepang dapat menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.



***Gambar 6***
*Suasana Perang PD II*
*Sumber :*
*oentoeku.multiple.com*

Angkatan perang Amerika Serikat di bawah komando Jenderal Mc. Arthur dan Laksamana Chester Nimitz berhasil menggulung angkatan perang Jepang; sedangkan Laksamana Lord Louis Mountbatten menyerbu Birma dari Barat, dan Asia Tenggara. Dari Saipan dan Okinawa, angkatan udara Amerika Serikat membom kota-kota di Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima, sedangkan bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Di antara kedua peristiwa pemboman tersebut Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945, akhirnya Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945

menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berakhirlah Perang Asia Timur Raya.

Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasan. Kesempatan ini digunakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia untuk mempersiapkan lebih matang kemerdekaannya. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka.

Sejak saat itu muncullah dua kekuatan raksasa dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Kedua kekuatan raksasa tersebut sering terjadi perselisihan pendapat. Perselisihan tersebut mencapai puncaknya setelah berakhirnya Perang Dunia II. Perkembangan hubungan kedua negara raksasa yang mewakili kedua blok yang ada dalam masa pasca perang dikenal dengan nama Perang Dingin.

**Kerja Individual**

Cobalah kalian cari dari berbagai buku sumber maupun kamus yang ada mengenai pengertian Perang Dingin, secara individu

Pembagian dunia yang seolah-olah hanya terdiri atas dua blok tersebut, masing-masing menuntut agar semua negara yang ada di dunia menjatuhkan pilihannya kepada salah satu blok. Pilihan itu adalah demikian ketatnya, sehingga sikap tidak pro sudah dianggap anti, sedangkan sikap netral dikutuk.

Bagi pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan, menghadapi keadaan seperti itu masih dengan keraguan. Meskipun amanat alinea I dan aline IV Pembukaan UUD 1945 cukup jelas, namun karena keadaan yang belum memungkinkan, maka belum mempunyai sikap yang tegas.

Perkembangan selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia menghadapi berbagai kesulitan. Perundingan dengan Pemerintah Belanda yang dihadiri oleh Komisi Tiga Negara (KTN) dari PBB terputus, karena Belanda

menolak usul Critchly - Dubois; sementara oposisi dari Front Demokrasi Rakyat (FDR) - PKI yang dipimpin oleh Muso semakin menghebat. FDR-PKI mengusulkan, agar dalam meyikapi pertentangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet tersebut pihak Pemerintah RI memihak kepada Uni Soviet.

Untuk menanggapi sikap FDR-PKI tersebut maka Wakil Presiden Mohammad Hatta yang waktu itu memimpin Kabinet Presidensiil dalam memberikan keterangannya di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 2 September 1948 mengemukakan pernyataan yang merupakan penjelasan pertama tentang politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu "Politik Bebas Aktif". Mohammad Hatta mengemukakan : ..... mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Rusia atau Pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.



***Gambar 7***
*Bung Hatta sedang mendampingi Bung Karno dalam suatu kegiatan. Sumber : Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka*

Selanjutnya Mohammad Hatta mengemukakan ".... Perjuangan kita harus diperjuangkan di atas dasar semboyan kita yang lama : Percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari pergolakan politik internasional. Memang tiap-tiap politik untuk mencapai kedudukan negara yang kuat ialah

mempergunakan pertentangan internasional yang ada itu untuk mencapai tujuan nasional. Belanda berbuat begitu, ya segala bangsa sebenarnya berbuat semacam itu, apa sebab kita tidak akan melakukannya? Tiap-tiap orang di antara kita tentu ada mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapi perjuangan bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan kepada realitas, kepada kepentingan negara kita setiap waktu."

"…. Jika perjuangan ini ditinjau dari jurusan komunisme, memang benar pendirian bahwa segala-galanya didasarkan kepada politik Soviet Rusia. Bagi seorang komunis, Soviet Rusia adalah modal untuk mencapai segala cita-citanya, karena dengan Soviet Rusia bangun atau jatuhnya perjuangan komunisme.

Tidak demikian pendirian seorang nasionalis, sekalipun pandangan kemasyarakatannya berdasarkan sosialisme. Dari jurusan politik nasional kemerdekaan itulah yang terutama, sehingga segala tujuan dibulatkan kepada perjuangan mencapai kemerdekaan. Perhitungan yang terutama ialah, betapa aku akan mencapai kemerdekaan bangsaku selekas-lekasnya, dan dengan sendirinya perjuangannya itu mengambil dasar lain daripada perjuangan yang dianjurkan oleh seorang komunis. Kemerdekaan nasional terutama, siasat perjuangan disesuaikan dengan keadaaan. Oleh karena itu tidak dengan sendirinya ia memilih antara dua aliran yang bertentangan. Betapa juga besar simpatinya kepada aliran yang lebih dekat padanya, ia tetap memilih langkah sendiri dalam menghadapi soal-soal kemerdekaan.

Sebagai bangsa yang baru kita mempunyai banyak kelemahan dibandingkan dengan dua raksasa, Amerika Serikat dan Soviet Rusia, menurut anggapan pemerintah kita harus tetap mendasarkan perjuangan kita dengan adagium: "percaya kepada diri dan berjuang atas tenaga dan kesanggupan yang ada pada kita".

Keterangan Wakil Presiden dihadapan sidang BP-KNIP sama sekali tidak menyebutkan atau menggunakan

kata-kata politik bebas aktif. Namun makna bebas aktif dapat disimak dari judul keterangannya "Mendayung diantara Dua Karang " yang artinya tidak lain dari politik bebas aktif. Mendayung sama artinya dengan upaya (aktif), dan "diantara dua karang" adalah tidak terikat oleh dua kekuatan adikuasa yang ada (bebas).

## Mari Diskusi

Bentuklah kelas kalian menjadi kelompok-kelompok.

Tugas kalian adalah mendiskusikan dalam kelompok hal berikut ini : Apa yang melatarbelakangi Bung Hatta menyampaikan keterangan di depan BP-KNIP tanggal 2 September l948 dengan judul "Mendayung di antara Dua Karang"?

Politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana telah dicanangkan oleh Mohammad Hatta dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia terus mengalami perkembangan, yaitu Kabinet Natsir pada bulan September 1950 memberi keterangan di depan Parlemen, dengan meninjau politik luar negeri dari segi pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam keterangan tersebut antara lain disebutkan: Antara dua kekuasaan yang timbul, telah muncul persaingan atas dasar pertentangan ideologi dan haluan yang semakin meruncing. Kedua belah pihak sedang mencari dan mendapatkan kawan atau sekutu, membentuk golongan atau blok: Blok Barat dan Blok Timur.

Dengan demikian pertentangan paham dan haluan makin meluas dan mendalam, sehingga menimbulkan keadaan perang dingin dan dikuatirkan sewaktu-waktu akan menyebabkan perang di daerah perbatasan antara dua pengaruh kekuasaan itu. Dalam keadaan yang berbahaya itu Indonesia telah memutuskan untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas. Dalam menjalankan politik yang bebas itu kepentingan rakyatlah yang menjadi pedomannya, di samping itu pemerintah akan berusaha untuk membantu tiap-tiap usaha untuk mengembalikan perdamaian dunia, tanpa jadi politik oportunis yang hanya didasarkan perhitungan laba dan rugi, dan tidak berdasarkan cita-cita luhur.

Selanjutnya Kabinet Sukiman pada bulan Mei 1951 juga memberikan keterangan di muka parlemen, yang antara lain mengatakan : Politik luar negeri RI tetap berdasarkan Pancasila, pandangan hidup bangsa yang menghendaki perdamaian dunia. Pemerintah akan memelihara hubungan persahabatan dengan setiap negara dan bangsa yang menganggap Indonesia sebagai negara dan bangsa bersahabat, berdasarkan harga menghargai, hormat menghormati. Berhubung dengan adanya ketegangan politik, yaitu antara Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat, maka pemerintah Indonesia tidak akan menambah ketegangan itu dengan turut campur dalam perang dingin yang merajalela antara dua blok itu. Atas pendirian di muka, maka Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentu menggunakan forum PBB tersebut untuk membela cita-cita perdamaian dunia.

Pada bulan Mei 1952 Kabinet Wilopo menerangkan kepada Parlemen antara lain : ... asal mulanya pemerintah menyatakan sikap bebas dalam perhubungan luar negeri, ialah untuk menegaskan bahwa berhadapan dengan kenyataan adanya dua aliran bertentangan dalam kalangan internasional yang mewujudkan dua blok yaitu Blok Barat dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dan Blok Timur dengan Uni Soviet dan teman-temannya. Republik Indonesia bersifat bebas dengan makna :

a. tidak memilih salah satu pihak untuk selamanya dengan m gikat diri kepada salah satu blok dalam pertentangan itu, dan

b. tidak mengikat diri untuk selamanya; akan tidak campur tangan atau bersifat netral dalam tiap-tiap peristiwa yang terbit dari pertentangan antara dua blok itu tadi.

Demikianlah penegasan demi penegasan mengenai politik luar negeri Republik Indonesia. Namun didalam perjalanan sejarahnya, ternyata politik luar negeri yang bebas aktif tersebut mengalami penyimpangan, yaitu pada masa pemerintah Orde lama (1960-1965). Pada masa tersebut Republik Indonesia semakin terikat pada

blok komunis, sedangkan negara-negara blok Barat dimusuhi dan dicap sebagai "nekolim", kolonialisme-imperialisme gaya baru. Persahabatan dan perdamaian di dunia menjadi berkonfrontasi dengan negara serumpun mengganyang Malaysia. Pada masa Orde Lama itu muncullah apa yang dikenal dengan nama poros Jakarta - Pnom Penh - Hanoi- Peking - Pyongyang, dan berakhir pada klimaksnya peristiwa pemberontakan komunis dengan G. 30.S/PKI nya pada tanggal 30 September 1965.

**Kerja Kelompok**

1. Bentuklah kelas kalian dalam kelompok-kelompok.
2. Carilah dari berbagai buku sumber yang ada mengenai praktik pelaksanaan politik luar negeri RI pada masa Orde Lama.
3. Tiap kelompok membuat laporan secara tertulis. Salah satu kelompok mempresentasikan hasilnya, dan kelompok lainnya memberi masukan.

c. Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa Orde Baru

Meletusnya pemberontakan G.30.S/PKI menimbulkan banyak korban, terutama korban jiwa. Akibatnya muncullah berbagai tuntutan yang disponsori oleh berbagai kesatuan aksi dengan tuntutannya yang terkenal "TRITURA" (Tri Tuntutan Rakyat), yaitu bubarkan PKI, turunkan harga dan reshuffle kabinet. Tuntutan pertama dapat dipenuhi pada tanggal 12 Maret 1966. Dan segera setelah itu pada bulan Juni sampai Juli 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (setelah anggota-anggotanya diperbaharui) menyelenggarakan Sidang Umum dengan menghasilkan sebanyak 24 ketetapan. Salah satu ketetapan MPRS tersebut adalah Ketetapan No.XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI. Di dalam ketetapan tersebut antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :

1) Bebas-aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2) Mengabdi kepada kepentingan nasional dan Amanat Penderitaan Rakyat.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif bertujuan mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialis dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan menegakkan ke tiga segi kerangka tujuan Revolusi, yaitu :

1) Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.
2) Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu.
3) Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

Kemudian secara berturut-turut penegasan politik luar negeri yang bebas-aktif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selalu dipertegas dalam setiap kali menyelenggarakan sidang umum, baik Sidang Umum 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998 maupun dalam Sidang Umum MPR 1999. Penegasan politik Luar Negeri Bebas-Aktif yang dituangkan di dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 Bab III huruf B Arah Pembangunan Jangka Panjang, di sana ditegaskan : Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia terus dapat meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.

Rumusan tersebut dipertegas lagi pada bab IVD (Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan) huruf c bidang politik. Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan

Luar Negeri, di mana dalam hal hubungan luar negeri diatur dalam hal-hal sebagai berikut :

1) Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada Kepentingan Nasional, khususnya pembangunan ekonomi.
2) Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pengembangan ketahanan nasionalnya masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.
3) Mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan Kepentingan dan Kedaulatan Nasional.

**Mari Diskusi**

Diskusikan dalam kelompok, mengenai pelaksanaan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif – pada masa Orde Baru.

d. Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Era Reformasi

Sidang Umum MPR 1999 juga kembali mempertegas politik luar negeri Indonesia. Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar Negeri, dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1) Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

2) Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

3) Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

4) Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan.

5) Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.

6) Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.

7) Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.




***Gambar 8 & 9***
*Presiden SBY menyampaikan pidato pada Sidang ke-62 Majelis Umum PBB, New York, AS, Selasa (25/9) siang waktu setempat. (foto: abror/ presidensby.info)*
*SUMBER : www.presidenri.go.id*

Politik Luar Negeri di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 – 2009, dalam visi dan misi beliau diantaranya dengan melakukan usaha memantapkan politik luar negeri. Yaitu dengan

cara meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Prestasi Indonesia sejak 1 Januari 2007 menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dimana Republik Indonesia dipilih oleh 158 negara anggota PBB. Tugas Republik Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah :

1). Ketua Komite Sanksi Rwanda

2). Ketua komite kerja untuk pasukan penjaga perdamaian

3). Ketua Komite penjatuhan sanksi untuk Sierra Leone

4). Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Sudan

5) Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Kongo

6). Wakil Kertua Komite penyelesaian konflik Guinea Bissau

Baru-baru ini Indonesia berani mengambil sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak tetap DK PBB yang bersikap abstain ketika semua negara lainnya memberikan dukungan untuk memberi sanksi pada Iran.

Selain itu Republik Indonesia juga dipercaya dunia untuk duduk sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang bermarkas di Jenewa. Jika tahun lalu untuk masa tugas 1 tahun, maka sekarang Republik Indonesia terpilih untuk periode 3 tahun hingga 2010. Saat itu dalam Sidang Majelis Umum PBB, Republik Indonesia memperoleh dukungan 182 suara diantara 190 negara anggota yang memiliki hak pilih. Hal ini berarti masyarakat internasional menaruh apresiasi yang tinggi terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia. Republik Indonesia sendiri akan memanfaatkan masa keanggotaan di Dewan HAM untuk melanjutkan implementasi progresif berbagai komitmen yang telah disampaikan Pemerintah Republik Indonesia sendiri. Kita semua berharap semoga semua menjadi kenyataan. Bagaimana apakah kalian setuju?

e. Ciri-ciri Politik Bebas Aktif Republik Indonesia

Dalam berbagai uraian tentang politik Luar Negeri yang bebas aktif , maka Bebas dan Aktif disebut sebagai sifat politik luar negeri Republik Indonesia. Bahkan di belakang kata bebas dan aktif masih ditambahkan dengan sifat-sifat yang lain, misalnya anti kolonialisme, anti imperialisme.

**Kerja Kelompok**

1. Bentuk kelompok.
2. Carilah perbedaan dan persamaan mengenai politik luar negeri RI antara masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru serta Era Reformasi.

Dalam dokumen Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1989) yang telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri RI tanggal 19 Mei 1983, dijelaskan bahwa sifat Politik Luar Negeri adalah: (1) Bebas Aktif .... (2) Anti kolonialisme ... (3) Mengabdi kepada Kepentingan Nasional dan ... (4) Demokratis.

Dalam risalah Politik Luar Negeri yang disusun oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri, Suli Sulaiman ....yang disebut sifat politik luar negeri hanya Bebas Aktif serta anti kolonialisme dan anti Imperialisme. Sementara M. Sabir lebih cenderung untuk menggunakan istilah ciri-ciri dan sifat secara terpisah. Menurut M Sabir, ciri atau ciri-ciri khas biasanya disebut untuk sifat yang lebih permanen, sedangkan kata sifat memberi arti sifat biasa yang dapat berubah-ubah. Dengan demikian karena bebas dan aktif merupakan sifat yang melekat secara permanen pada batang tubuh politik bebas aktif, penulis menggolongkannya sebagai ciri-ciri politik bebas-aktif sedangkan Anti Kolonialisme dan Anti Imperialisme disebutnya sebagai sifat.

**Kerja Individu**

Dari berbagai rumusan politik luar negeri bebas aktif tersebut, buatlah rumusan secara bebas dengan menggunakan kalimat sendiri. Berilah contoh kebijakan politik luar negeri Indonesia yang kalian ketahui, secara individu.

f. Pengertian Politik Bebas Aktif Republik Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif. Karena itu dalam uraian ini akan dikutip beberapa pendapat mengenai pengertian bebas dan aktif. A.W Wijaya merumuskan: Bebas, berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.



***Gambar 10***
*Presiden SBY dan Presiden Bush, di Istana Bogor, Senin (20/11) petang. (foto: anung/ presidensby.info)*

Sementara itu Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut :

Bebas : dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif : berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif .

B.A Urbani menguraikan pengertian bebas sebagai berikut : perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengertian ini, dapat diberi definisi sebagai “berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”

**Kerja Kelompok**

1. Bentuk kelompok.
2. Tugas kelompok kalian adalah mencari sejumlah contoh lain mengenai peranan Indonesia di dalam percaturan internasional dewasa ini.
3. Hasil temuannya dibuat laporan secara tertulis.

g. Tujuan Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Di dalam dokumen yang berhasil disusun oleh pemerintah yang dituangkan di dalam Rencana Strategi Politik Luar negeri Republik Indonesia (1984-1989) antara lain dinyatakan bahwa politik Luar negeri suatu negara hakekatnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional. Sedangkan di Indonesia, jika dicermati, rumusan pokok kepentingan nasional itu dapat dicari dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa bangsa Indonesia diamanatkan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang menyelenggarakan empat fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi Hankam, dalam hal ini adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2) Fungsi Ekonomi, yaitu memajukan kesejahteraan umum.
3) Fungsi Sosial dan Budaya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
4) Fungsi Politik, yaitu pada rumusan kalimat ... ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ke empat fungsi pokok tersebut sesungguhnya sekaligus juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia.

## 4. Peranan Indonesia dalam Percaturan Internasional.

Partisipasi aktif Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia telah ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam setiap Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) PBB melalui pengiriman Konting kin meningkatnya jumlah OPP PBB, peran serta Indonesia dalam OPP PBB selama beberapa tahun terakhir justru mengalami penurunan. Dalam kaitan ini, dipandang perlu pembentukan suatu Pusat OPP Nasional (National Peacekeeping Center) sebagai suatu mekanisme kerja yang melakukan fungsi koordinatif inter-departemen secara teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelatihan personel untuk mempersiapkan kontingen militer, polisi dan sipil dalam misi perdamaian PBB. Dan pada November tahun 2006 Indonesia mengirim Konga ke Lebanon. Sampai sekarang kita sudah mengirimkan pasukan Konga XXIII B ke Lebanon

a. Saat ini Indonesia menjadi anggota di lebih dari 170 organisasi internasional. Jumlah kewajiban kontribusi Pemerintah RI sehubungan dengan partisipasinya dalam keanggotaan pada organisasi internasional untuk tahun 2004 adalah sebesar + Rp. 140 milyar.

b. Dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum khususnya kepada TKI, selama tahun 2004 Pemerintah telah mengadakan serangkaian perundingan untuk mewujudkan MoU, antara lain: antara RI dan Uni Emirat Arab (UAE) mengenai Penempatan TKI ke UAE yang menegaskan hak dan kewajiban TKI dan pengguna jasa; RI dan Malaysia mengenai Penempatan TKI di Sektor Formal ke Malaysia yang didasari oleh keinginan untuk menertibkan penempatan dan perlindungan TKI sektor formal di luar negeri; serta RI dan Korea Selatan tentang pengiriman TKI ke Korea Selatan yang mengatur proses rekrutmen, pengiriman dan pemulangan TKI.

Kalian tentunya masih ingat apa sifat politik luar negeri Indonesia. Bebas aktif kan? Dalam rangka mewujudkan politik luar negeri yang bebas dan aktif itulah, maka

Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini Indonesia sudah cukup banyak pengirimkan Kontingen Garuda (KONGA) ke luar negeri. Sampai sekarang ini Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke duapuluh tiga (XXIII).

Secara garis besar kontingen garuda yang telah dikirim ke luar negeri secara berturut-turut adalah :



***Gambar 11***
*Pasukan KONGA XXIII B saat saat bertugas di Lebanon di Sumber: insansains.files.word press.com*

1. Konga I bertugas di Mesir, yang dikirim pada bulan Nopember 1956, dengan tugas mengamankan dan mengawasi genjatan senjata di Mesir.
2. Konga II dikirim pada bulan September 1960 yang bertugas di Kongo. Tugas ini diembannya sampai bulan Mei 1961.
3. Konga III dikirim ke Kongo pada bulan Desember 1963 sampai Agustus 1964.
4. Konga IV, Konga V dan Konga VII di kirim ke Vietnam, dan bertugas mulai bulan Januari 1974.
5. Konga VI, dikirim ke Sinai, Mesir, bertugas dari bulan Agustus 1973 sampai April 1974.
6. Konga VIII, ke Sinai, Mesir, pada bulan September 1974.
7. Konga IX, ke Irak-Iran, pada bulan Agustus 1988 sampai bulan Nopember 1990.
8. Konga X, ke Namibia, pada bulan Juni 1989 sampai Maret 1990.
9. Konga XI, ke perbatasan Irak-Kuwait, pada bulan April 1991 sampai Nopember 1991.
10. Konga XII, ke Kamboja, pada bulan Oktober 1991 sampai Mei 1993.
11. Konga XIII, ke Somalia, pada bulan Juli 1992 sampai April 1993.

12. Konga XIV, ke Bosnia Herzegovina, bulan Nopember 1993 sampai Nopember 1995.
13. Konga XV, ke Georgia, bulan Oktober 1994 sampai Nopember 1995.
14. Konga XVI, ke Mozambik, tahun 1994.
15. Konga XVII, ke Philipina, Oktober 1994 sampai Nopember 1994.
16. Konga XVIII, ke Tajikistan, Nopember 1997.
17. Konga XIX, yang terdiri atas XIX-1, XIX-2, XIX-3 dan XIX-4, bertugas di Siera Leone, mulai 1999 sampai 2002.
18. Konga XX, bertugas di Republik Demokratik Kongo, tahun 2005.
19. Konga XXI-XXIII , bertugas di Lebanon, 2006- sampai sekarang.

Selain pengiriman Kontingen Garuda, Indonesia juga mempunyai sumbangan yang cukup berarti bagi penyelesaian sengketa yang terjadi di Kamboja, dengan menyelenggarakan Pertemuan Informal Jakarta (Jakarta Informal Meeting) I dan II. Indonesia juga menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, menjadi anggota Badan Tenaga Atom Internasional. Salah seorang putra terbaik Indonesia juga pernah memegang jabatan Presiden Majelis Umum PBB yaitu Adam Malik tahun 1971.



***Gambar 12***
*TNI dalam menjalankan tugas negara Sumber : www.detik.com*

Indonesia juga menjadi sponsor dan sekaligus tuan rumah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955; menjadi salah satu sponsor lahirnya Gerakan Non Blok, juga sponsor lahirnya organisasi regional Asia Tenggara “ASEAN” 8 Agustus 1967di Bangkok-Thailand.

Apa yang diuraikan adalah sejumlah contoh yang menggambarkan bagaimana peranan Indonesia di dalam percaturan internasional.

## C. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Sekarang ini kita sudah berada dalam era globalisasi, tentu saja kita tidak akan dapat melepaskan diri dari globalisasi ini. Sudah barang tentu globalisasi ini akan berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kehidupan yang ada dalam masyarakat dilihat dari pekerjaan seseorang (guru, pegawai, petani) maupun dilihat dari tempat tinggal yang berbeda (desa atau kota). Dalam kehidupan berbangsa tentu dilihat dari unsur yang paling kecil yaitu keluarga, suku bangsa dan bangsa. Dan kehidupan bernegara yang meliputi aspek-aspek kenegaraan (infra struktur dan supra struktur).

**Inkuiri Nilai**

*Bagaimana agar Globalisasi dapat memberikan pengaruh posotif bagi masyaakat Indonesia?*

### 1. Dampak Globalisasi Ekonomi

Pada bagian awal telah diungkapkan selintas bagaimana produk-produk negara lain memasuki pasar kita. Itu merupakan tanda yang menunjukkan terjadinya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini sesungguhnya didukung oleh sebuah kekuatan yang luar biasa hebatnya, yaitu apa yang disebut liberalisme ekonomi, yang sering juga disebut kapitalisme pasar bebas.



***Gambar 13***
*Pengaruh gaya hidup asing antar lain melalui makanan yang kita santap sehari-hari. Sumber : www.hot-screensaver.com*

Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Kapitalisme ini mempunyai tiga ciri pokok, yaitu pertama, sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu; kedua, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang bersifat kompetitif; ke tiga, modal diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba. Dalam perkembangannya sistem kapitalisme ini berkembang tidak sehat, karena timbulnya persaingan tidak sehat dan mengabaikan unsur etika dan moral. Dimana yang modalnya kuat akan menguasai yang modalnya lemah, akhirnya Pemerintah harus ikut mengaturnya.

Bagi negara-negara berkembang, hal tersebut jelas akan sangat merugikan, karena produk dalam negerinya tidak akan mampu bersaing dengan produk negara maju.

Selain itu, bagi masyarakat, yang mengikuti pola hidup yang konsumtif, akan langsung menggunakan apa saja yang datang dari negara lain, karena barangkali itu yang dianggap paling baik, juga sebagai pertanda sudah memasuki kehidupan yang modern.

Jika dilihat dari kacamata yang positif, maka globalisasi akan mempunyai dampak yang menyenangkan, karena dengan globalisasi di bidang ekonomi, orang akan secara mudah memperoleh barang konsumtif yang dibutuhkan, membuka lapangan kerja bagi yang memiliki keterampilan, dapat mempermudah proses pembangunan industri, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

## 2. Dampak Globalisasi Sosial Budaya

Dalam bidang sosial dan budaya, dampak globalisasi antara lain adalah meningkatnya individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Saat ini di kalangan generasi muda banyak yang seperti kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala Barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif dan hedonisme. Namun di sisi lain globalisasi juga dapat mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Misalnya melahirkan pranata-pranata atau lembaga-lembaga sosial baru seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi dan pasar modal. Perkembangan pakaian, seni dan ilmu pengetahuan turut meramaikan kehidupan bermasyarakat.



***Gambar 14***
*Melestarikan budaya daerah merupakan bagian dari upaya mempertahankan jatidiri bangsa. Sumber: brangwetan.wordpress.com*

## 3. Dampak Globalisasi Politik

Dalam bidang politik, dampak globalisasi antara lain adalah dengan perubahan sistem kepartaian yang dianut, sehingga memunculkan adanya partai baru-partai baru; kesadaran akan perlunya jaminan perlindungan hak asasi manusia HAM), terjadinya perubahan sistem

ketatanegaraan, pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota–anggota parlemen, pemilihan Presiden dan Wapres, Pemilihan Gubernur dan Wagub serta pemilihan Bupati dan Wabup/ Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung.

Tetapi kita harus waspada karena adanya perubahan tersebut akan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, karena tidak semuanya masyarakat kita berpendidikan. Selain itu perubahan yang terjadi tidak selalu cocok jika diterapkan di Indonesia. Hal ini akan bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita.

## Refleksi

Setelah kalian mempelajari seluruh rangkaian materi pembelajaran dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bab ini, cobalah kalian kemukakan pendapatmu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Tunjukkan bagian mana, materi pembelajaran yang belum kalian pahami?
2. Tanyakan kepada guru atau kepada teman materi pembelajaran yang belum kalian pahami!
3. Apa komentar kalian setelah mempelajari bab ini?

## Rangkuman

Globalisasi yang merupakan suatu proses tatanan masyarakat yang bersifat mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, akan memberikan dampak baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Semua aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun hankam akan terkena dampaknya. Menghindar atau bersifat tertutup dari dampak globalisasi adalah menjadi tidak mungkin, karena kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Untuk itu kita harus mempunyai sikap dalam menghadapi globalisasi, sehingga kita tidak terhanyut dalam menghadapi dampak globalisasi yang bersifat negatif. Menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme masih sangat diperlukan untuk seluruh bangsa Indonesia, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi globalisasi.

Dalam melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia maka Indonesia melakukan politik luar negeri yang berdasarkan kepada kepentingan nasionalnya. Sehingga setiap kegiatan dalam percaturan internasional tidak akan merugikan kepentingan nasionalnya. Kerjasama dengan bangsa lain di dunia dilakukan dengan prinsip saling menghormati dan bersifat bebas dan aktif. Dengan demikian bangsa Indonesia akan mampu bersaing secara sehat dengan bangsa lainnya di muka bumi dan mewujudkan tujuan nasionalnya dengan baik.

## Evaluasi

**I. Jawablah soal-soal berikut ini dengan singkat dan jelas.**

1. Jelaskan, mengapa bagi Indonesia globalisasi itu dipandang penting?
2. Politik luar negeri RI bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Di manakah rumusan pokok kepentingan nasional itu dapat ditemukan?
3. Fungsi apakah yang harus diselenggarakan Pemerintah Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945?
4. Apakah pengertian politik luar negeri yang bebas dan aktif itu?
5. Jelakan peranan apakah yang dilakukan oleh Indonesia di dalam percaturan internasional?

## II. Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal di bawah ini :

1. Globalisasi adalah suatu proses tatanan kehidupan masyarakat yang mendunia dan dalam pelaksanaannya ...
   a. tidak dapat dibatasi oleh siapapun
   b. kurang dapat dikontrol kemana arahnya
   c. tidak mengenal batas wilayah
   d. mengarah pada satu titik tertentu

2. Dampak globalisasi yang bernilai negatif di bidang sosial budaya diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali ...
   a. bergaya hidup konsumtif
   b. berdandan ala Barat
   c. munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat
   d. sikap hedonisme

3. Berikut merupakan contoh percaturan Indonesia di dunia internasional, kecuali ...
   a. pengiriman pasukan Kontingen Garuda
   b. menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
   c. mendirikan ASEAN
   d. pengiriman pasukan ke Poso

4. Sifat Politik Luar Negeri Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ...
   a. bebas aktif
   b. anti imperialisme
   c. mengabdi kepada kepentingan Nasional
   d. demokratis

5. Perhatikan pernyataan berikut ini
   1. adanya persaingan bebas yang dapat mengakibatkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang
   2. bisa mengakibatkan munculnya sifat konsumtif
   3. interaksi (kontak) antar bangsa di dunia lebih mudah
   4. tuntutan demokratisasi dan HAM yang bersifat global berpengaruh kuat mendorong negara-negara dunia ke tiga untuk merespon tuntutan tersebut.

   Manakah nilai-nilai positif globalisasi bagi Indonesia
   a. 1 dan 2
   b. 2 dan 3
   c. 2 dan 5
   d. 3 dan 4

6. Perhatikan pernyataan berikut ini
   1. bisa mengakibatkan munculnya sifat individualisme
   2. semakin berkembangnya sektor industri
   3. terjadinya kesenjangan sosial
   4. rasa persaudaraan sebagai warga negara global semakin menguat

   Manakah nilai-nilai negatif globalisasi bagi Indonesia
   a. 1, 2 dan 3
   b. 1, 3 dan 4
   c. 1, 4 dan 3
   d. 2, 4 dan 3

7. Dasar hukum Politik Luar Negeri Indonesia adalah ...
   a. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan alinea 2
   b. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan alinea 3
   c. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan alinea 4
   d. Pembukaan UUD 1945 alinea 2 dan alinea 4

8. Sarana yang berpengaruh pada dunia yang tanpa batas di era globalisasi saat ini adalah ...
   a. lembaga swadaya masyarakat
   b. telepon dan radio
   c. media elektronika dan media massa
   d. pialang dan biro jasa

9. Dalam rangka mengantisipasi dampak yang bersifat negatif dari perdagangan bebas, maka dapat dilakukan dengan cara ...
   a. kerjasama dengan negara maju
   b. mengganti sistem ekonomi yang baru
   c. menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tangguh kepada para pengusaha Indonesia
   d. menjalankan sistem ekonomi berdikari tanpa kerjasama dengan negara maju

10. Ciri-ciri globalisasi adalah sebagai berikut, kecuali ...
    a. segala sesuatu itu terus mendunia
    b. tanpa dibatasi oleh ruang
    c. tanpa dibatasi oleh waktu
    d. sikap, pola dan gaya hidup harus mengikuti Amerika Serikat

## III. Skala Sikap

SKALA SIKAP DENGAN ALASAN

Petunjuk khusus

1. Skor maksimun untuk penentuan sikap adalah 4, dan untuk alasan adalah 4, sehingga keseluruhan skor maksimum adalah 8.
2. Kolom alasan bila tidak mencukupi dibuat di bawah tabel pernyataan ini.

| No | Pernyataan | SS | S | TS | STS | Alasan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menolak adanya globalisasi | | | | | |
| 2. | Mendukung sepenuhnya adanya globalisasi | | | | | |
| 3. | Mendukung globalisasi yang menguntungkan bagi kepentingan bangsa Indonesia | | | | | |

Keterangan: SS = sangat setuju,
S = setuju,
N = netral,
TS = tidak setuju,
STS = sangat tidak setuju

Bab
4

# PRESTASI DIRI

Manusia hidup di muka bumi ini tidak hanya untuk sekedar makan dan minum saja. Tetapi sebagai manusia harus mempunyai aktivitas lainnya. Apakah hanya hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Semuanya tergantung pada diri individu masing-masing. Tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Robert J Tamasy, hidup di dalam dunia ini, upaya menunjukkan keunggulan diri *(self promotion)* tidak hanya dianggap biasa, tetapi juga seolah dianjurkan-bahkan kita dituntut untuk melakukannya. Kita masih ingat sebagaimana yang dikatakan Mohamad Ali ketika meraih gelar juara tinju dunia, dia berteriak "Sayalah yang terbesar". Ungkapan itu merupakan pernyataan kebanggaan akan keunggulan diri dan prestasinya dalam olah raga tinju. Sebenarnya untuk berprestasi tidak hanya di bidang olah raga, namun juga dalam bidang yang lain seperti seni atau ilmu pengetahuan.

**Peta Konsep**




**Kata Kunci :** Prestasi Diri, Keunggulan Bangsa

Pada bab ini kalian akan mempelajari tentang prestasi diri bagi keunggulan bangsa, hubungan potensi diri dan prestasi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan dan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa. Pada akhirnya kalian diharapkan dapat mewujudkan potensi diri menjadi prestasi diri yang membanggakan bangsa.

## A. PRESTASI DIRI BAGI KEUNGGULAN BANGSA

Setiap bangsa di dunia ini tentu memiliki kekhasan yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak terkecuali dengan bangsa dan negara Indonesia. Sejak berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memiliki prestasi diri yang tidak sedikit. Prestasi diri adalah suatu kebanggaan yang telah dimiliki/diraih oleh suatu bangsa. Prestasi diri dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok bahkan bangsa. Seperti baru-baru ini Human Development Index Indonesia tahun 2007 menduduki peringkat 107 dunia, atau mengalami peningkatan prestasi dalam menangani korupsi dan tidak lagi menjadi negara terkorup seperti sebelumnya.



***Gambar 1***
*Chris John petinju berprestasi dari Indonesia. Sumber : www.ekaristi.org*



***Gambar 2***
*Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Taruna lulusan terbaik. Sumber : beritasore.com*

## Coba Amati

Perhatikan Gambar 1 dan 2 tersebut. Apa yang kalian pikirkan berkaitan dengan gambar tersebut? Aktivitas apa saja yang dapat diamati dari pelaku dalam gambar tersebut? Mengapa mereka melakukan aktivitas itu? Apakah mereka dapat disebut telah berprestasi ?

Setelah kalian mengamati gambar 1 dan 2 dan menjawab beberapa pertanyaan di atas. Coba bandingkan pemahaman kalian tentang aktivitas dan hubungannya dengan prestasi diri dengan paparan berikut ini.

Setiap manusia apapun profesinya tentu akan mempunyai keinginan untuk berprestasi. Oleh karena dengan berprestasi seseorang akan dapat menilai apakah dirinya sudah berhasil mencapai tujuan hidupnya atau tidak, juga untuk membawa nama baik bangsa dan negara jika memang bisa. Pengertian prestasi yaitu hasil yang telah dicapai, dilakukan, diperoleh atau dikerjakan. Prestasi tiap orang tidak akan sama, ada yang berprestasi dalam hal :

- melukis
- berolahraga
- irama musik
- cepat menghitung
- puisi
- pemimpin
- menyesuaikan diri
- tampil menawan dan lain-lain

Manakah yang paling bagus prestasinya? Tidak mungkin terjawab dengan tepat, karena masing-masing peristiwa menampilkan “tokoh” yang memiliki kecerdasan dalam bentuk yang berbeda-beda. Prestasi antara orang satu dengan lainnya tentu tidak akan sama, dan seseorang tidak akan mungkin menjadi orang yang sama persis dengan orang yang dikagumi prestasinya. Mengapa demikian?

Pada hakikatnya manusia adalah individu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki potensi diri yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga prestasi diri setiap orang tentu tidak akan sama. Itu sebabnya para ahli

**Interpretasi**

*Bagaimana pendapatmu tentang prestasi Bangsa Indonesia di dunia Internasional?*

berpendapat bahwa setiap siswa adalah individu yang unik (berbeda satu dengan lainnya).

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik maka setiap orang berusaha berprestasi demi keunggulan bangsa Indonesia tercinta. Tentu sangat membanggakan jika kita dapat berprestasi seperti Taufik Hidayat, Susi Susanti, Gita Gutawa Juara menyanyi di Mesir tahun 2007, Usman Hasan Saputra, Hermawan Kertajaya, Prof Dr Ir BJ Habibie, Dahlan Iskan atau Ir Ciputra, serta masih banyak lagi yang dapat dilihat dan disaksikan sendiri. Semua berprestasi sesuai bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang olah raga, seni, budaya, maupun ilmu pengetahuan serta *enterpreneur* (wiraswasta). Mengapa mereka dapat berprestasi di bidangnya, dan mengapa kita tidak atau belum mampu berprestasi seperti mereka ?

**Kerja Individual**

Setelah memperhatikan uraian di atas, jawablah beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa setiap orang harus berprestasi, dan apa makna prestasi menurut kalian?
2. Sebutkan prestasi diri kalian selama ini, dan sebutkan prestasi terbaik yang pernah kalian raih.
3. Coba kalian ceritakan prestasi diri kalian di depan kelas.

## B. HUBUNGAN POTENSI DIRI DAN PRESTASI DIRI UNTUK BERPRESTASI SESUAI KEMAMPUAN

Salah satu aturan main dalam permainan hidup *(the game of life)* adalah diberlakukannya hukum kompetisi/ persaingan. Kenyataan menunjukkan semua orang memiliki keinginan umum yang sama : ingin kaya, ingin dihormati atau ingin berprestasi di bidang tertentu. Akan tetapi tidak semuanya dapat mencapai apa yang diinginkannya. Mengapa demikian?

Hal ini karena masing-masing individu memiliki potensi diri yang berbeda dengan lainnya. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna, kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari kelengkapan sisi-sisi manusia itu sendiri,

yaitu ada kebaikan ada pula keburukan. Ada kekuatan tetapi juga ada kelemahan. Manusia sebagai mahluk berpotensi yang selalu bertumbuh menuju aktualisasi dirinya, harus mampu mengenali ke dua sisi tersebut dengan baik. Namun tidak semua manusia berkehendak dan mau bekerja keras untuk mendayagunakan potensinya. Kekuatan yang berupa potensi-potensi diri yang istimewa menjadi sulit berkembang, karena kelemahan-kelemahan yang tidak bisa dikendalikan atau dikelola dengan baik.

Potensi berasal dari kata bahasa Inggris *to potent* yang berarti keras, kuat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud potensi adalah kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal.

Potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut masih terpendam dalam diri yang bersangkutan. Setiap manusia pada dasrnya memiliki potensi, tetapi tidak setiap manusia berkehendak dan mau bekerja keras untuk mendayagunakan potensi tersebut. Pengertian potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi. Potensi diri adalah kemampuan yang terpendam pada diri setiap orang, setiap orang memilikinya. Potensi diri ada yang positif dan ada yang negatif.

Potensi diri yang positif seperti :

1. Memiliki idealisme

   Sebagai generasi muda kita harus memiliki ide yang kita yakini kebenarannya dengan didukung fakta dan berusaha untuk mewujudkannya dalam tujuan hidup kita.

2. Dinamis dan kreatif

   Sifat dinamis dan kreatif dalam arti selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman tanpa berhenti untuk berkreasi dalam mencapai tujuan tanpa mengabaikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

**Interpretasi**

*Bagaimana pendapatmu tentang peluang berprestasi di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara*

3. Keberanian mengambil resiko

Setiap tindakan yang dilakukan bukan tanpa resiko, karena jika ada sebab pasti akan ada akibat. Untuk itu sebelum bertindak harus selalu mempertimbangkan masak-masak resiko yang akan timbul dan berusaha menghadapi serta mengatasinya dengan baik.

4. Optimis dan kegairahan semangat

Manusia yang hidup di era globalisasi sekarang ini tidak boleh pesimis, maka sebagai bagian dari dunia seseorang harus selalu optimis dan memiliki kegairahan semangat supaya tidak putus asa dan lemah sebelum bertanding. Para pahlawan telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia tetapi kita yang harus mempertahankan dan mengisinya melalui karya yang positif. Bangsa yang maju adalah bangsa yang rakyatnya mau bekerja keras, ulet dan tangguh dalam mewujudkan sebuah prestasi. Sebab perlu diingat bahwa Tuhan sendiri tidak akan mengubah kondisi suatu bangsa jika bangsa tersebut tidak mau berubah.

5. Kemandirian dan disiplin murni

Kita adalah bagian dari bangsa yang mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri dan memiliki disiplin yang tinggi. Pendidikan disiplin bukan hanya sekedar patuh terhadap aturan tetapi juga harus terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap hak dan keinginan orang lain, serta mau mengambil bagian dalam memikul tanggung jawab sosial secara manusiawi.

6. Fisik yang kuat dan sehat

Apa artinya jiwa yang meledak-ledak penuh semangat dengan berbagai ide jika tidak ditunjang oleh fisik yang kuat dan sehat? Tentu tidak akan ada artinya. Untuk itu potensi diri yang positif harus memperhatikan masalah yang satu ini karena sangat penting peranannya. Ingatkah kalian dengan pepatah: “di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat *(mensana in corpore sano)*“? Nah potensi diri yang positif adalah yang menjaga kekuatan dan kesehatan fisik.

7. Sikap ksatria

Ksatria adalah sikap yang sportif yaitu berani mengakui kesalahan dan kekalahan jika mengalaminya, serta bersedia meminta maaf untuk tidak mengulangi lagi perbuatan. Dalam falsafah masyarakat Jawa, seseorang baru pantas bergelar ksatria jika dia dapat" menang tanpa mengalahkan, kemudian mengalahkan tanpa merendahkan dan menyerang tanpa menyakiti ."

8. Terampil dalam menerapkan IPTEK

Melalui pendidikan dan pelatihan para siswa diharapkan dapat melatih keterampilannya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Jika memungkinkan dapat diperdalam di luar sekolah, sehingga menjadi generasi muda yang tidak gagap teknologi, dan mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Setelah itu mereka diharapkan dapat menerapkan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mengikuti lomba komputer daerah atau nasional.



***Gambar 3***
*Aktivitas siswa dalam mengikuti lomba komputer. Sumber: www.mycomputerstar.com*

Ini merupakan peran serta yang baik dari masyarakat dalam menunjang potensi diri siswa dalam berprestasi sehingga terampil dalam menerapkan IPTEK.

9. Kompetitif

Di tengah persaingan dunia seperti sekarang ini setiap individu harus mampu menunjukkan kelebihan dirinya, diantaranya dengan berkompetisi dengan bangsa lainnya. Kompetisi berasal dari bahasa Latin *to competere* yang kalau di Inggriskan menjadi *to seek together* (mencari bersama), *to agree* (menyetujui) atau *to coincide* (menyepakati bersama). Sebenarnya dalam berkompetisi tidak ditemukan adanya ajaran yang menjadikan orang lain sebagai objek atau musuh. Jadi kompetitif adalah orang lain dijadikan sebagai mitra dalam mencapai suatu prestasi.



***Gambar 4***
*Tim Olimpiade Fisika foto bersama dengan Presiden, Wakil Presiden, dan Mendiknas. Sumber : www.presidenri.go.id*

Masalah yang muncul jangan sampai kata kompetisi menjadi konkurensi *(to conquer defeat/ overcome enemy)* mengalahkan orang lain/musuh. Oleh karena hasil yang dicapai bukan lagi kemenangan *(winning)* melainkan memukul mundur *(beating)*. Selain itu jika kompetisi mensyaratkan adanya kompetensi atau keahlian, maka dalam konkurensi akan ada komparasi, gaya hidup membandingkan secara tidak sehat, dan praktik konkurensi adalah produk muatan pikiran irrasional yang bertentangan dengan logika hidup rasional. Bersaing itu sehat karena ada acuan, akan mendorong terciptanya energi dan akan dapat memacu prestasi diri seseorang, asal jangan menghalalkan segala cara, dan harus selalu ingat dosa dan Tuhan selalu mengawasi perilaku umatnya. Jika harus bersaing seharusnya dimulai dengan langkah sebagai berikut :

a. Berani memulai

b. Fokus pada keunggulan

c. Transformasi energi konkurensi

Maksudnya seseorang jika hendak bersaing harus mempersiapkan ke tiga hal di atas yaitu berani memulai tidak menunda, kemudian memfokuskan pada keunggulan yang dimiliki serta yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah energi persaingan yang bersifat negatif menjadi sesuatu yang positif, supaya terjadi persaingan yang sehat dan mencapai hasil yang optimal.

10. Daya pikir yang kuat

Untuk mencapai keberhasilan, seseorang harus memiliki daya pikir yang kuat dan didukung dengan motivasi yang kuat pula dalam dirinya. Karena hal ini merupakan penggerak untuk melakukan aktivitas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Descartes “Aku berfikir maka aku ada”. Jika orang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk berpikir dengan kuat maka dia akan mampu berprestasi dengan baik.

11. Memiliki bakat

Seseorang yang memiliki bakat yaitu mempunyai potensi yang dimilikinya sungguh beruntung karena akan mudah dalam mewujudkan prestasi dirinya. Untuk itu perlu dukungan dari keluarga dan lingkungan. Bakat yang besar tadi harus didukung dengan motivasi yang kuat dari dalam dirinya. Seorang pemimpin yang hebat selain bisa dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan akan lebih hebat jika dia memiliki bakat terpendam sebagai potensi dirinya.

Dalam upaya mengembangkan potensi diri ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan, antara lain :

a. Mengenali diri sendiri

b. Memposisikan diri

c. Mendobrak diri

d. Aktualisasi diri

**Kerja Individual**

Berapakah potensi positif masing-masing yang kalian miliki? Apakah potensi positif tersebut sudah kalian kembangkan?
Buatlah dalam selembar kertas dan kumpulkan pada guru.

Selain potensi diri yang positif setiap manusia juga memiliki potensi diri yang negatif seperti :

1. Mudah diadu domba

Semua kelebihan yang dimiliki dapat hilang percuma jika seseorang masih mudah diadu domba. Dalam berbagai aspek kehidupan hendaknya harus berhati-hati karena seseorang bisa diadu domba atau bahkan mungkin tergoda untuk menjadi pelakunya. Hal ini arus dihindari, karena sangat merugikan diri sendiri.

2. Kurang berhati-hati

Pepatah “biar lambat asal selamat” memang bisa diganti dengan “biar cepat tapi selamat”, tetapi tetap harus waspada dan berhati-hati. Mengapa demikian? Oleh karena kita sering terburu-buru tanpa memperhatikan resiko lainnya asalkan tujuan tercapai. Akibatnya memang tujuan tercapai tetapi ada resiko besar yang didapatkan.

3. Emosional

Emosional merupakan suatu keadaan perasaan atau kondisi kejiwaan yang sedang labil sehingga dapat mengganggu hubungan dengan orang lainnya. Biasanya muncul pada saat keadaan tidak normal, sehingga individu yang sedang emosional kurang bisa mengendalikan diri. Dia bisa marah, berteriak ataupun menangis. Sebenarnya semua aktivitas tadi boleh saja dilakukan asalkan tetap terkendali dan tidak mengganggu orang lain.

Potensi diri yang positif adalah jika kita tidak mudah emosional yaitu kita memiliki kecerdasan emosi *(emotional quotient)* yang baik.

4. Kurang percaya diri

Banyak dari generasi muda yang belum mengerjakan sesuatu sudah menyerah dengan mengatakan tidak mampu melaksanakannya. Jadi generasi muda menyerah atau kalah sebelum bertanding. Sebenarnya ada kemampuan tetapi karena kurang percaya diri menjadi tidak mau melakukan sesuatu. Sungguh disayangkan karena kesempatan emas menjadi hilang. Hal ini berarti harga diri *(self esteem)* mereka adalah negatif karena cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga.

Potensi diri yang positif adalah jika kita memiliki rasa percaya diri yang besar. Ciri-ciri individu yang kurang percaya diri :

a. Berusaha menunjukkan sikap konformis, semata-mata demi mendapatkan pengakuan dan penerimaan kelompok
b. Menyimpan rasa takut /kekhawatiran terhadap penolakan
c. Sulit menerima realita diri (terutama dalam menerima kekurangan diri) dan memandang rendah kemampuan diri sendiri-namun di lain pihak memasang harapan yang tidak realistik terhadap diri sendiri
d. Pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif
e. Takut gagal, sehingga menghindari segala resiko dan tidak berani memasang target untuk berhasil

f. Cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus (karena *undervalue* diri sendiri)

g. Selalu menempatkan/memposisikan diri sebagai yang terakhir, karena menilai dirinya tidak mampu

h. Mempunyai *external locus of control* (mudah menyerah pada nasib, sangat bergantung pada keadaan dan pengakuan/penerimaan serta bantuan orang lain).

Apakah kalian termasuk orang yang kurang percaya diri? Jika ya, maka sebaiknya hindarilah sifat tersebut. Karena hal tersebut akan merugikan diri kita. Jika tidak, maka bersyukurlah dan pertahankan karena itu merupakan sesuatu yang berharga bagi diri kalian dalam mencapai prestasi.

5. Kurang mempunyai motivasi

Manusia bukanlah benda mati yang bergerak hanya bila ada daya dari luar yang mendorongnya, melainkan makhluk yang mempunyai daya dalam dirinya untuk bergerak. Inilah yang dinamakan motivasi. Sehingga motivasi sering disebut penggerak perilaku *(the energizer of behaviour)*.

Motivasi adalah bidang yang amat sering dipelajari oleh para psikolog karena pengetahuan akan determinan perilaku ini akan banyak membantu dalam meramalkan dan mengendalikan dampak dari suatu keadaan tertentu terhadap kehidupan manusia. Ini berhubungan dengan prestasi diri sebagai suatu perilaku yang muncul karena potensi diri yang ada dengan didorong motivasi yang kuat. Motivasi adalah dorongan baik yang berasal dari dalam diri seseorang maupun yang berasal dari luar diri seseorang tersebut, misalnya dari keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Adanya motivasi akan mempercepat tercapainya tujuan untuk berprestasi.

Oleh karena itu kita harus punya motivasi supaya kebutuhan hidup terpenuhi, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi sebagaimana dikemukakan oleh Abraham H Maslow, yaitu dari kebutuhan fisiologis dasar, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai dan paling tinggi

kebutuhan aktualisasi diri yang berupa kesempatan dan kebebasan untuk mewujudkan cita-cita sesuai kemampuan yang dimiliki setiap individu.

Hubungan antara potensi diri dengan prestasi diri sangat erat, karena untuk berprestasi seseorang harus mengenali terlebih dahulu potensi yang ada dalam dirinya. Potensi diri yang negatif harus dihilangkan, sebaliknya potensi yang positif harus dimunculkan. Jadi kita seharusnya memaksimalkan potensi atau kekuatan dan sekaligus meminimalkan pengaruh kelemahan kita. Menurut Andri Wongso, caranya : Pertama berkomitmen untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan tersebut, ke dua melakukan usaha yang sungguh-sungguh untk menghentikan pengaruhnya setiap kali kelemahan diri tersebut muncul dan ke tiga menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang mendorong mencuatnya potensi kita, dan pada saat bersamaan membenamkan kelemahan-kelemahan kita. Dan ke tiganya ini harus dimulai sekarang juga karena tindakan adalah kekuatan



***Gambar 5***
*Ikhsan dan Dirly finalis Indonesian Idol 2006. Sumber: img219.imageshack.us*

Orang yang punya potensi disebut juga dengan manusia unggul terlebih jika dia dapat mewujudkan potensinya dengan baik, akan tetapi jangan sampai menjadi sombong. Ciri-ciri manusia unggul adalah :

1. Memiliki keimanan yang utuh.
2. Melaksanakan amal ibadah
3. Memiliki akhlak mulia, yang terdiri dari amanah, ikhlas, tekun, berdisiplin, bersyukur, sabar, dan adil.



***Gambar 6***
*Gita Gutawa menjadi juara menyanyi di Mesir 2007. Sumber : img.kapanlagi.com*

Ke tiga hal ini akan semakin lengkap jika didukung oleh hal-hal positif yang dimiliki oleh seseorang. Prestasi diri seseorang akan semakin bermakna jika dilandasi oleh keimanan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka berprestasi bukan semata kepentingan pribadi tetapi demi kepentingan yang lebih luas lagi. Untuk kepentingan nusa, bangsa dan negara.

## Coba Amati

Perhatikan Gambar 5 dan 6. Apa yang kalian pikirkan berkaitan dengan gambar tersebut? Potensi diri apa yang dimiliki oleh Ikhsan dan Dirly sehingga mereka mempunyai prestasi sebagai Finalis Indonesia Idol 2006? Atau prestasi Gita Gutawa menjadi juara menyanyi di Mesir tahun 2007? Apakah kalian mempunyai potensi seperti mereka? Jika ya, apakah kalian mau menjadi seperti mereka? Jika tidak, maka kalian mau berprestasi di bidang apa sesuai potensi diri yang kalian miliki?

## C. PERAN SERTA DALAM BERBAGAI AKTIVITAS UNTUK MEWUJUDKAN PRESTASI DIRI SESUAI KEMAMPUAN DEMI KEUNGGULAN BANGSA.

## Coba Amati

Perhatikan Gambar 7 dan 8 di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan berkaitan dengan gambar tersebut? Bagaimana peran serta yang dilakukan Prof.Dr.Ir.BJ.Habibie dan Ir Ciputra sehingga mereka mempunyai prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa? Bagaimana peran serta diri kalian sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa?



***Gambar 7 dan 8***
*Prof.Dr.Ir.BJ.Habibie dan Ir. Ciputra. Sumber : www.habibie center.co.id, www.indomedia.com*

Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar 7 dan 8? Prof Dr Ir BJ Habibie dan Ir Ciputra mereka adalah putra bangsa yang banyak perprestasi sesuai dengan potensi masing-masing. Ir Ciputra salah satu pengusaha yang sukses dalam bidang properti dan peduli pada pendidikan, selain seorang yang sukses sebagai *enterpreneur* yang mampu menghasilkan berbagai projek di Indonesia. Menurut Ir Ciputra *entrepreneur* bukanlah suatu hal yang bersifat mistik dan misterius, juga bukan soal bakat, tetapi bisa

dibentuk melalui pelatihan dan pendidikan yang terarah sejak usia dini. Sejak sekarang generasi muda harus punya keinginan yang berlipat, ngotot, dan bekeja keras menjadi wirausahawan. *Enterpreneur* mampu menciptakan peluang dan selalu menjadi inovator, juga berani mengambil resiko. Selain itu salah satu kepeduliannya adalah berkenaan dengan dorongannya pada seseorang putra bangsa Indonesia bernama Umar Hasan Saputra yang telah berprestasi dengan menemukan Nutrisi Saputra dari IPB Bogor. Ada 10 manfaat dari hasil temuannya yang diteliti sejak tahun 1992 sampai mendapatkan hasil pada tahun 2002, tetapi baru diumumkan secara luas tahun 2006.

**Inkuiri Kepustakaan**

*Cari tokoh-tokoh penting baik Nasional atau dunia yang berprestasi. Buatlah kliping.*

Manfaat Nutrisi Saputra adalah menghemat pupuk, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, ramah lingkungan, mudah dibawa dan disimpan, tahan kekeringan, panen lebih cepat, penggunaan mudah, banyak gunanya dan ketersediaan stok barang. Selain itu lebih tahan hama, dan rendemen lebih tinggi.

Prof Dr Ir BJ Habibie selain dikenal sebagai mantan Wapres dan Presiden RI ke tiga, dikenal juga dengan prestasinya di bidang pesawat terbang dan kehliannya di bidang teknologi. Beliau mendirikan The Habibie Center pada tanggal 10 November 1999 di Jakarta. Lembaga ini didirikan sebagai suatu kendaraan yang diharapkan dapat membawa rakyat Indonesia untuk memulai proses demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan.Sebagai seorang mantan Presiden beliau menyadari adanya suatu kebutuhan untuk mempromosikan dan mengembangkan konsep demokrasi di Indonesia.

The Habibie Center didirikan oleh Bachruddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi independen, non pemerintah dan non profit. Dengan visi untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama, dan misi yang diemban adalah pertama, untuk menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi HAM, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan HAM. Kedua, memajukan

dan meningkatkan pengelolaan SDM dan usaha sosialisasi teknologi.

Umar Hasan Saputra, Ir Ciputra dan Prof Dr Ir BJ Habibie merupakan orang-orang yang mempunyai potensi diri (bakat) di bidang masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari tiga hal yaitu (1) kemampuan di atas rata-rata, (2) kreativitas dan (3) tanggung jawab terhadap tugas. Ini berarti mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata dan punya ciri-ciri kreativitas seperti dikemukakan oleh Cholisin sebagai berikut :

1. Dorongan ingin tahu besar
2. Sering mengajukan pertanyaan yang baik
3. Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah
4. Bebas dalam menyatakan pendapat
5. Mempunyai rasa keindahan
6. Menonjol dalam salah satu bidang seni
7. Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkap-kannya, tidak mudah terpengaruh orang lain
8. Memiliki rasa humor tinggi
9. Daya imajinasi kuat
10. Keaslian (orisinalitas) tinggi (tampak dalam ungkapan, gagasan, karangan, pemecahan masalah)
11. Dapat bekerja sendiri
12. Kemampuan elaborasi (mengembangkan atau meme-rinci) suatu gagasan.

Bagaimana dengan kalian apakah memiliki ciri-ciri kreativitas seperti yang telah disebutkan di atas?

Selain itu ciri-ciri kreativitas dapat dilihat dari seseorang yang memiliki rasa ingin tahu *(sense of curiosity)*, kebutuhan untuk berprestasi *(need of achievement)*, dapat beradaptasi *(adaptable)* dan memiliki kemampuan menempuh resiko.

Prestasi diri merupakan perwujudan dari bakat dan kemampuan, dan akan optimal jika dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam kaitannya dengan anak berbakat dinamakan anak lantip, Gardner memiliki pandangan yang berbeda, ia menyatakan bahwa

"keberbakatan" manusia bukanlah berdasarkan skor tes standar semata, namun sebagai:

1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia.
2. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan.
3. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang.

Anak berbakat (anak *lantip*) dibedakan dari anak jenius. Anak jenius disebut juga anak berbakat taraf sangat tinggi *(highly gifted)* yang sangat jarang ditemukan sedangkan anak berbakat banyak ditemukan di sekolah-sekolah. Ada lima macam keberbakatan, yaitu (1) keberbakatan intelektual, (2) keberbakatan akademik, (3) keberbakatan kreatif, (4) keberbakatan kepemimpinan dan sosial, dan (5) keber-bakatan seni.



***Gambar 9***
*Bakat anak bisa dikembangkan sejak kanak-kanak, antara lain melalui latihan memasak.*
*Sumber : salamjogja.files.wordpress.com*

Analisis dari Bloom tentang *lantip* pada Peserta Olympiade Science, bahwa :

Pertama, memiliki kemampuan luar biasa tinggi untuk mencurahkan sejumlah besar waktu dan usaha untuk mencapai suatu standar yang tinggi. Karakteristik ini telah ada pada usia 5 atau 8 tahun dan menjadi semakin bertambah setelah orang-orang tersebut menerima pengajaran beberapa tahun.

Kedua, memiliki sifat kompetitif dengan teman sebaya dalam bidang *talent* tersebut dan memiliki kebulatan tekad untuk melakukan yang terbaik.

Ketiga, memiliki kemampuan belajar secara cepat tentang teknik-teknik baru, ide-ide, dan proses dalam bidang *talent* tersebut.

Karakteristik *lantip* menurut Kitano dan Kirby memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- fisik yang menarik dan rapi dalam penampilan;
- diterima oleh mayoritas dari teman-teman sebaya dan orang dewasa;
- keterlibatan dalam beberapa kegiatan sosial, mereka memberikan sumbangan positif dan konstruktif;
- kecenderungan dipandang sebagai juru pemisah dalam pertengkaran dan pengambil kebijakan oleh teman sebayanya;
- memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang *(egalitarian)* dan jujur;
- perilakunya tidak defensif dan memiliki tenggang rasa;
- bebas dari tekanan emosi dan mampu mengontrol ekspresi emosional sehingga relevan dengan situasi;
- mampu mempertahankan hubungan abadi dengan teman sebaya dan orang dewasa;
- mampu merangsang perilaku produktif bagi orang lain;
- memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menanggulangi situasi sosial dengan cerdas, humor, dan pemahaman.



***Gambar 10***
*Pagelaran musik seruling dengan peserta terbanyak sebagai wujud penyaluran bakat anak.*
*Sumber: i174.photobucket.com*

Karakteristik di atas biasanya dimiliki oleh mereka yang telah berprestasi. Prestasi akan mencapai hasil yang bagus jika dalam situasi dan kondisi saat kesempatan pengembangan bakat *(lantip)* dipenuhi. Hal ini bisa diperoleh dari guru yang memberikan peluang kepada siswa untuk berkembang potensinya secara optimal. Kepribadian guru dapat membantu siswa untuk berprestasi antara lain :

1. Bersikap terbuka terhadap hal-hal baru
2. Peka terhadap perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis
3. Mempunyai pertimbangan luas dan dalam

4. Penuh pengertian
5. Mempunyai sifat toleransi
6. Mempunyai kreativitas yang tinggi
7. Bersikap ingin tahu



***Gambar 11***
*Guru sedang mengajar, Sumber : www.ekatjiptafoundation.org*

Selain memiliki kepribadian, guru juga harus memiliki hubungan sosial dengan siswa yang dapat mendorong timbulnya prestasi yaitu suka dan pandai bergaul dengan anak berbakat serta memahami kesulitan yang dihadapi anak tersebut. Selain itu guru diharapkan dapat menyesuaikan diri dan mudah bergaul serta mampu memahami dengan cepat tingkah laku anak berbakat tersebut. Untuk anak berbakat memang harus ada perhatian khusus dari guru karena kadang-kadang mereka bertindak berbeda dengan teman lainnya. Misalnya bertanya secara kritis, meminta perhatian lebih bahkan terkadang seperti melawan guru. Untuk itu kebesaran hati dari guru untuk tidak bertindak negatif, tetapi malah lebih memperhatikan mereka sehingga dapat memperlihatkan bakatnya.

Selain guru, peran orangtua juga tidak kalah pentingnya dalam mengembangkan potensi diri yang dimiliki anak untuk menjadi prestasi diri sesuai kemampuannya. Meskipun hak utama pengajaran yang utama ada di tangan orangtua, tetapi alangkah baiknya jika orangtua tidak memaksakan kehendak kepada anaknya untuk menjadi apa kelak. Orangtua seharusnya bersikap demokratis dalam arti menyerahkan kepada anak mau menjadi apa kelak, tetapi tetap di sampingnya untuk selalu mendampingi dan mengingatkannya jika mereka salah. Orangtua selalu memberikan fasilitas, doa dan dorongan demi keberhasilan anaknya.

Peran masyarakat juga tidak kalah pentingnya, karena bagaimanapun hebatnya seseorang berprestasi jika tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat tentu tidak bermakna. Berbeda jika hasil prestasi dirinya dapat dirasakan

masyarakat tentu akan lebih bermakna, seperti prestasi Tim bulutangkis Indonesia, kemenangan Tim Olimpiade Fisika Indonesia maupun temuan Nutrisi Saputra oleh Usman Hasan Saputra. Peran masyarakat juga bisa dengan memberikan dukungan dana dalam suatu prestasi yang dicapai seseorang, misalnya memberikan bea siswa, hadiah, atau memberikan biaya penelitian sehingga menghasilkan suatu prestasi.

Semua merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, seseorang yang punya potensi diri akan mampu menunjukkan prestasi diri dengan motivasi yang kuat dengan dukungan keluarga, guru dan masyarakat. Peran guru bisa diganti oleh pelatih maupun seseorang yang punya kepedulian seperti Yohanes Saputra dalam Tim Olimpiade Fisika Indonesia ataupun Ir Ciputra dalam penelitian Nutrisi Saputra oleh Umar Hasan Saputra.

Kebutuhan untuk berprestasi terjemahan dari *need of achievement* sebagaimana dikemukakan John Atkinson dan David Mc Clelland pada tahun 1940-an. Kebutuhan berprestasi atau n-ach tercermin dari perilaku individu yang selalu mengarah pada suatu standar keunggulan. Orang-orang yang mempunyai perilaku seperti ini menyukai tugas-tugas yang menantang, tanggung jawab secara pribadi, dan terbuka untuk umpan balik guna memperbaiki prestasi inovatif-kreatifnya. Hal inilah yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dapat berprestasi, jika dikaitkan dengan teori Maslow maka hal ini dapat dikatakan merupakan kebutuhan aktualisasi diri.

Tahap aktualisasi diri menurut Andri Wongso merupakan proses realisasi potensi diri setelah kita mampu melakukan tindakan-tindakan cepat, berani ambil resiko, dan mampu mengambil pelajaran atas keberhasilan dan kegagalan kita. Dalam proses perwujudan ini kita dituntut untuk melakukan segala sesuatunya secara profesional, efektif, dan efisien. Sebab ini sangat berkaitan dengan peluang atau kesempatan yang kita peroleh.

Berbagai upaya untuk mencapai prestasi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dikemukakan oleh Sujiyanto yaitu :



***Gambar 12 & 13***
*Lomba Kontes Robot Indonesia (KRI) ITS. SUMBER : www.its.ac.id*

1. Kreatif dan inovatif

Kreatif dan inovativ merupakan upaya memiliki daya cipta, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal. Sedangkan inovatif berarti memperkenalkan sesuatu yang baru bersifat pembaharuan, upaya berprestasi dengan cara memperbarui atau menyempurnakan metode, sistem, atau strategi yang ada menjadi lebih sesuai atau relevan dengan perkembangan jaman.

Ciri-cirinya antara lain peka terhadap lingkungan, dinamis dan progresif, serta terbuka.

2. Tanggung-jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyelesaikan tugas yang diterimanya dengan sebaik mungkin. Untuk itu bisa dilakukan dengan cara skala prioritas, fokus program dan penjadwalan dan optimalisasi kegiatan secara terpadu. Seseorang yang bertanggungjawab akan dapat berprestasi dengan baik karena dia telah menyelesaikan kewajibannya dengan baik sesuai yang telah disepakati sebelumnya. Tanggungjawab tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada masyarakat dan yang paling tinggi pada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Bekerja keras

Orang yang suka bekerja keras disayang Tuhan, kalian tentu ingat “beribadahlah kamu seolah akan mati esok hari dan bekerjalah dengan keras seolah kamu akan hidup 1000 tahun lagi.” Ini berarti setiap orang akan serius dalam mengerjakan sesuatu. Akan mengoptimalkan seluruh daya dan upaya demi tercapainya suatu prestasi diri dengan bekerja keras.

Dalam bekerja keras kalian tidak akan terlepas dari kekuatan ketahanan mental, karena pengembangan diri tidak bisa terlepas dari kekuatan ketahanan

mental. Kesuksesan yang tidak disertai dengan ketahanan mental akan menjadi kesuksesan yang rapuh fondasinya.Untuk itu ketahanan mental harus kita tempa dan kita tanamkan sejak kita mulai perjuangan dengan cara memelihara spirit sebagai manusia pembelajar yang sejati, selalu berdoa, selalu mengucap syukur dan bermeditasi.

4. Memanfaatkan Sumber Daya

Walaupun manusia sebagai mahluk yang paling sempurna di dunia ini tetapi tidak dapat hidup sendiri, melainkan tetap membutuhkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Memanfaatkan sumber daya alam dan bekerjasama dengan manusia lainnya demi tercapainya tujuan.

Setiap individu dituntut untuk menguasai beberapa keterampilan seperti keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan dalam bidang tertentu. Selain itu sebagai mahluk sosial, manusia juga dituntut untuk mampu mengatasi segala masalah yang timbul sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan sosial dan harus mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan prestasi diri dan sebagai mahluk sosial maka penekanan lebih pada keterampilan-keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya, biasanya disebut dengan aspek psikososial. Keterampilan tersebut harus mulai dikembangkan sejak masih anak-anak, misalnya dengan memberikan waktu yang cukup buat anak-anak untuk bermain atau bercanda dengan teman-teman sebaya, memberikan tugas dan tanggungjawab sesuai perkembangan anak, dan sebagainya. Dengan mengembangkan keterampilan tersebut sejak dini maka akan memudahkan anak dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan berikutnya sehingga ia dapat berkembang secara normal dan sehat saat ia remaja atau dewasa.

Dalam pandangan Zainun Mu'tadin bahwa keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri

menjadi semakin penting dan krusial manakala anak sudah menginjak masa remaja. Hal ini disebabkan karena pada masa remaja individu sudah memasuki dunia pergaulan yang lebih luas dimana pengaruh teman-teman dan lingkungan sosial akan sangat menentukan.



***Gambar 14***
*Menanam padi sebagai wujud kerja keras. Sumber : www.serambinews.com*

Kegagalan remaja dalam menguasai keterampilan-keterampilan sosial akan menyebabkan dia sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat menyebabkan rasa rendah diri, dikucilkan dari pergaulan, cenderung berperilaku yang kurang normatif (misalnya asosial ataupun anti sosial), dan bahkan dalam perkembangan yang lebih ekstrim bisa menyebabkan terjadinya gangguan jiwa, kenakalan remaja, tindakan kriminal, tindakan kekerasan, dan sejenisnya. Keadaan ini dinamakan prestasi diri yang negatif atau gagal. Tentu sangat susah untuk membuat mereka berperan serta dalam berbagai aktivitas yang berujung pada prestasi, atau memiliki prestasi diri yang positif atau sukses.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka amatlah penting bagi remaja untuk dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Permasalahannya adalah bagaimana cara melakukan hal tersebut dan aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan.Hal ini penting sekali karena seseorang yang punya potensi sekalipun tidak selamanya akan selalu sukses. Kadangkala dia akan mengalami kegagalan. Tetapi menanamkan pengertian bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda adalah penting sekali, sehingga dia akan terpacu untuk mencoba lagi sampai berhasil.

Kalian tentu masih ingat ketika masih kecil kita berkali-kali jatuh ketika belajar berjalan, tetapi kita selalu mencoba dan mencoba lagi dan akhirnya kita berhasil. Apa jadinya jika kita tidak mau mencoba lagi tentu kita tidak akan pernah bisa berjalan bukan? Nah mengapa ketika kalian sudah bertambah usia ketangguhan kita menghadapi kegagalan semakin berkurang?

Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja yang berada dalam fase perkembangan masa remaja adalah memiliki keterampilan sosial *(social skill)* untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan sosial tersebut meliputi:

1. Kemampuan berkomunikasi
2. Menjalin hubungan dengan orang lain
3. Menghargai diri sendiri dan orang lain
4. Mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain
5. Memberi atau menerima *feedback*
6. Memberi atau menerima kritik
7. Bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku.

Apabila keterampilan sosial dapat dikuasai oleh remaja pada fase tersebut maka ia akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Hal ini berarti pula bahwa sang remaja tersebut mampu mengembangkan aspek psikososial dengan maksimal sehingga dia akan dapat berprestasi.

Hasil studi Davis dan Forsythe, dalam kehidupan remaja terdapat delapan aspek yang menuntut keterampilan sosial *(social skill)* yaitu:

1. Keluarga
2. Lingkungan
3. Kepribadian
4. Rekreasi
5. Pergaulan dengan lawan jenis
6. Pendidikan/sekolah
7. Persahabatan dan solidaritas kelompok
8. Lapangan Kerja

Hubungannya dengan prestasi diri maka seorang remaja dalam pengembangan aspek psikososialnya, harus dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kondisi yang kondusif sehingga membuat tercapainya prestasi diri. Di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat berpengaruh bagi pengembangan aspek psikososial remaja:

**Inkuiri Nilai**

*Diskusikan dengan temanmu, bagaimana cara mengaktualisasikan diri di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat?*

1. Keluarga

Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan. Jika seorang anak memperoleh kepuasan psikis dalam keluarga, maka akan sangat menentukan bagaimana dia akan bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis atau *broken home* dimana anak tidak mendapatkan kepuasan psikis yang cukup maka anak tersebut sulit mengembangkan keterampilan sosialnya. Hal ini dapat terlihat dari :

- kurang adanya saling pengertian *(low mutual understanding)*
- kurang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan orangtua dan saudara
- kurang mampu berkomunikasi secara sehat
- kurang mampu mandiri
- kurang mampu memberi dan menerima sesama saudara
- kurang mampu bekerjasama
- kurang mampu mengadakan hubungan yang baik



***Gambar 15***
*Keluarga sedang Rekreasi. SUMBER : www.2.srv.foto pages.com*

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka amatlah penting bagi orangtua untuk menjaga agar keluarga tetap harmonis. Keharmonisan dalam hal ini tidaklah selalu identik dengan adanya orangtua utuh (Ayah dan Ibu), sebab dalam banyak kasus orangtua sendiri *(single parent)* terbukti dapat bersifat efektif dalam membantu perkembangan psikososial anak. Hal yang paling penting diperhatikan oleh orangtua adalah menciptakan suasana yang demokratis di dalam keluarga. Suasana yang mendukung tercapainya prestasi diri.

2. Lingkungan

Anak-anak harus sudah diperkenalkan dengan lingkungan sejak dini, meliputi lingkungan fisik (rumah, pekarangan) dan lingkungan sosial (tetangga). Selain

itu lingkungan juga meliputi lingkungan keluarga (batih/inti dan keluarga besar), lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat luas. Dengan pengenalan lingkungan maka sejak dini anak sudah mengetahui bahwa dia memiliki lingkungan sosial yang luas, tidak hanya terdiri dari orangtua, saudara (keluarga inti), atau kakek dan nenek saja (keluarga besar). Dengan melaksanakan kegiatan sejenis anak akan semakin bertambah wawasannya.

3. Kepribadian

Secara umum penampilan sering diindentikkan dengan manifestasi dari kepribadian seseorang, namun sebenarnya tidak selalu demikian. Yang tampil tidak selalu mengambarkan pribadi yang sebenarnya. Untuk itulah amat penting bagi remaja untuk tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan semata, sehingga orang yang memiliki penampilan tidak menarik cenderung diremehkan. Untuk itu, orangtua perlu memberikan penanaman nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa mendasarkan pada hal-hal fisik seperti materi atau penampilan. Akan tetapi dalam hal tertentu memang tetap harus memperhatikan penampilan, karena sedikit banyak kepribadian seseorang memang kadang dapat dilihat dari penampilan seseorang. Oleh karena orang yang berkepribadian baik biasanya selalu menghargai penampilannya.



***Gambar 16 & 17***
*Berkuda di Pantai Selatan Parang Tritis dan Borobudur. Sumber : www.beagungself.blogspot.com*

4. Rekreasi

Rekreasi merupakan kebutuhan sekunder yang sebaiknya dapat terpenuhi. Dengan rekreasi seseorang akan merasa mendapat kesegaran baik fisik maupun psikis, sehingga terlepas dari rasa capai, bosan, monoton serta mendapatkan semangat baru. Akhirnya akan muncul ide dan kreativitas baru.

5. Pergaulan dengan Lawan Jenis

Untuk dapat menjalankan peran menurut jenis kelamin, maka anak dan remaja seyogyanya tidak dibatasi pergaulannya hanya dengan teman-teman yang memiliki jenis kelamin yang sama. Pergaulan dengan lawan jenis akan memudahkan anak dalam mengidentifikasi *sex role behavior* (peran perilaku jender) yang menjadi sangat penting dalam persiapan berkeluarga maupun ketika sudah berkeluarga. Tentu saja tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

6. Pendidikan

Pada dasarnya sekolah meng-ajarkan berbagai keterampilan kepada anak. Salah satu keterampilan tersebut adalah keterampilan-keterampilan sosial yang dikaitkan dengan cara-cara belajar yang efisien dan berbagai teknik belajar sesuai dengan jenis pelajarannya. Dalam hal ini peran orangtua adalah menjaga agar keterampilan-keterampilan tersebut tetap dimiliki oleh anak atau remaja dan dikembangkan terus-menerus sesuai tahap perkembangannya.

7. Persahabatan dan Solidaritas Kelompok

Pada masa remaja peran kelompok dan teman-teman amatlah besar. Tidak jarang mereka lebih mementingkan urusan kelompok dibandingkan urusan keluarganya. Hal tersebut merupakan suatu yang normal sejauh kegiatan yang dilakukan remaja dan kelompoknya bertujuan positif dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini orangtua perlu memberikan dukungan sekaligus pengawasan agar remaja dapat memiliki pergaulan yang luas dan bermanfaat bagi perkembangan psikososialnya.

8. Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri

Untuk membantu tumbuhnya kemampuan penyesuaian diri, maka sejak awal anak diajarkan untuk lebih memahami dirinya sendiri (kelebihan dan kekurangannya) yaitu potensi dirinya, agar mampu mengendalikan dirinya sehingga dapat bereaksi se-

cara wajar dan normatif. Agar anak dan remaja mudah menyesuaikan diri dengan kelompok, maka tugas orang tua/pendidik adalah membekali diri anak dengan membiasakannya untuk menerima dirinya, menerima orang lain, tahu dan mau mengakui kesalahannya. Dengan cara ini, remaja tidak akan terkejut menerima kritik atau umpan balik dari orang lain/kelompok, mudah membaur dalam kelompok dan memiliki solidaritas yang tinggi sehingga mudah diterima oleh orang lain/kelompok.




***Gambar 18***
*"Indahnya Kebersamaan" Lomba Panjat Pinang. Sumber : www.i157.photobucket.com*

Selain itu anak harus diajarkan sejak dini untuk dapat memilih prioritas tugas-tugas yang harus segera diatasi, bukan menunda atau mengalihkan perhatian pada tugas yang lain. Karena itu sejak awal sebaiknya orang tua atau pendidik telah memberikan bekal agar anak dapat memilih mana yang penting dan mana yang kurang penting melalui pendidikan disiplin, tata tertib dan etika.

Masih banyak cara-cara lain yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan ketrampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri remaja. Kalianpun bebas memilih cara-cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan kalian sehari-hari.

Satu hal yang harus selalu kita ingat adalah bahwa dengan membantu remaja dalam mengembangkan keterampilan sosial berarti kita telah membantu mereka dalam menemukan dirinya sendiri sehingga mampu berperilaku sesuai norma yang berlaku. Pada akhirnya mereka sebagai bagian dari generasi muda dapat berperan serta dalam berbagai aktivitas dan berprestasi dengan baik sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa.

## Refleksi

Setelah memperhatikan uraian di atas, kerjakan beberapa pertanyaan berikut ini :

1. Tunjukkan bagian mana, materi pembelajaran yang belum kalian pahami?
2. Tanyakan kepada guru atau kepada teman materi pembelajaran yang belum kalian pahami!
3. Apa komentar kalian setelah mempelajari bab ini?

## Rangkuman

Di era globalisasi sekarang ini menuntut peran serta aktif dari warga negaranya demi eksistensi suatu negara. Begitu juga dengan negara tercinta Indonesia yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk berperan serta secara aktif yang menjadi prestasi diri bukan suatu hal yang mudah. Untuk itu seseorang harus mempunyai potensi diri dan didukung oleh semangat/motivasi yang luar biasa dari dirinya, didukung keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

Untuk berprestasi terlebih dahulu seseorang harus bisa mengenali potensi yang ada pada dirinya. Potensi diri yang positif seperti memiliki idealisme, dinamis dan kreatif, keberanian mengambil resiko,optimis dan kegairahan semangat, kemandirian dan disiplin murni, fisik yang kuat dan sehat, sikap ksatria, terampil dalam menerapkan IPTEK, kompetitif, daya pikir yang kuat dan memiliki bakat harus terus ditumbuh kembangkan. Potensi diri yang negatif seperti mudah diadu domba, kurang berhati-hati, emosional, kurang percaya diri, dan kurang mempunyai motivasi hendaknya dikurangi atau jika bisa harus dihilangkan.

Upaya mencapai prestasi dapat dilakukan dengan cara-cara kreatif dan inovatif, tanggung-jawab, bekerja keras, dan memanfaatkan sumber daya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu mengatasi segala masalah yang timbul sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan sosial dan kita harus mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Untuk itulah setiap individu dituntut untuk menguasai beberapa keterampilan seperti keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan dalam bidang tertentu.

Dalam hubungannya dengan prestasi diri dan sebagai mahluk sosial maka penekanan lebih pada keterampilan-keterampilan sosial dan kemam-

puan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya, biasanya disebut dengan aspek psikososial yang terdiri dari kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima *feedback*, memberi atau menerima kritik dan bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku.Pada akhirnya seseorang akan bisa berperan serta dalam berbagai aktivitas sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa, menjadi manusia yang unggul tanpa merasa sombong.

## Evaluasi

### I. Jawablah secara singkat dan jelas !

1. Jelaskan mengapa setiap orang mempunyai keinginan untuk berprestasi?
2. Mengapa setiap orang mempunyai prestasi yang berbeda satu dengan lainnya?
3. Mengapa seseorang harus berprestasi bagi keunggulan bangsanya ?

### II. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Semua orang mempunyai keinginan umum yang sama seperti hal-hal sebagai berikut, kecuali ...
   a. ingin dihormati
   b. ingin berprestasi
   c. ingin kaya
   d. ingin ditakuti
2. Potensi diri adalah ...
   a. hasil yang telah dicapai, dilakukan, diperoleh atau dikerjakan
   b. kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi
   c. sesuatu yang positif dan negatif
   d. sesuatu yang tidak bisa berkembang
3. Sifat yang selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman tanpa berhenti untuk berkreasi dalam mencapai tujuan tanpa mengabaikan norma yang ada dinamakan ...
   a. optimis dan kegairahan semangat
   b. dinamis dan kreatif
   c. memiliki idealisme
   d. sikap ksatria
4. Jika harus bersaing seharusnya dimulai dengan hal-hal sebagai berikut, kecuali ...
   a. berani memulai
   b. fokus pada keunggulan
   c. siap dana yang besar

d. transformasi energi konkurensi

5. Ciri-ciri individu yang kurang percaya diri adalah sebagai berikut, kecuali ...
   a. menyimpan rasa takut/ kekhawatiran terhadap penolakan
   b. pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif
   c. mudah menyerah pada nasib
   d. kooperatif

6. Orang yang mempunyai potensi diri disebut juga ...
   a. manusia unggul
   b. manusia berbudi
   c. manusia kuat
   d. manusia kreatif

7. Prestasi seseorang akan semakin bermakna jika ...
   a. dilandasi oleh keimanan yang kuat terhadap Tuhan YME
   b. didukung oleh keluarga
   c. didukung pleh kelompok
   d. didukung dana yang banyak

8. Taufik Hidayat, Susi Susanti dan Chris John adalah mereka yang berprestasi di bidang ...
   a. seni
   b. olah raga
   c. musik
   d. ilmu pengetahuan

9. Berikut ini merupakan tindakan yang kadang dianggap negatif, yang kadang-kadang dilakukan anak berbakat berbeda dengan teman lainnya, kecuali ...
   a. bertanya secara kritis
   b. meminta perhatian lebih
   c. bahkan terkadang seperti melawan guru
   d. dapat memperlihatkan bakatnya

10. Berikut ini merupakan ciri-ciri manusia unggul, kecuali ...
    a. Memiliki keimanan yang utuh.
    b. Melaksanakan amal ibadah
    c. Memiliki akhlak mulia, yang terdiri dari amanah, ikhlas,tekun, berdisiplin, bersyukur, sabar, dan adil
    d. Memiliki rasa percaya diri yang berlebihan

## III. Problem solving/pemecahan masalah

Akhir-akhir ini terdapat banyak generasi muda yang tidak dapat mengenali potensi dirinya. Hal ini tentu dapat memberikan masalah bagi dirinya.

Coba kalian kenali potensi dalam dirimu sendiri dengan menggunakan indikator potensi diri sebagai berikut:

1. kemampuan di atas rata-rata;
2. ada kreativitas; dan
3. ada rasa tanggung jawab terhadap tugas.

Sekarang coba kalian kemukakan potensi diri kalian apa adanya, kemudian buatlah rancangan untuk mengembangkan potensi untuk berprestasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan kalian masing– masing.

# Daftar Pustaka


----------,1982, *Undang-undang Nomor 20 tahun 19822 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI.*

---------- ,1999, *Undang-undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.*

----------, 2002, *Undang*-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara , Citra Umbara: Bandung.

Budiardjo, Miriam, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta.

Darmawan (2004), *Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkuat Integrasi Nasional*, Makalah pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Revitalisasi Nasionalisme Indonesia menuju *Character and Nation Building* di Jakarta, Lemhanas-UNJ.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)*, Direktorat PLP Depdiknas: Jakarta.

F. Isjawara ,1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta: Bandung.

Samego, Indria, 2001, *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara*, The Habibie Center: Jakarta.

Fajar, Malik, 2004, *Pendidikan Kewarganegaraan menuju Nation and Character Building*, Makalah, pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Revitalisasi Nasionalisme Indonesia menuju *Character and Nation Building* di Jakarta, Lemhanas-UNJ.

www.dephan.go.id,2003, INDONESIA: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, Dephan: Jakarta.

Cholisin, dkk, 2005, *Panduan Pembelajaran Kewarganegaraan SMA/MA kelas XI*, Mediatama: Surakarta

Gerungan, 1991, *Psikologi Sosial*, PT Eresco:Bandung

Irwanto,dkk, 1991, *Psikologi Umum*, APTIK dan Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Mu'tadin, Zainun, *Mengenal Kecerdasan Emosional Remaja*, Internet Jakarta 16 Oktober 2002

----------, *Disiplin*, Internet Jakarta 29 Juli 2002

Siahaan, Parlindungan, 2005, *Materi dan Soal-Soal Kewarganegaraan Semester Gasal SMA/MA Kelas XI*, Media Profesional .

Sujiyanto,Muhlisin, 2004, *Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk 2 SMA*, PT Ganeca Exact:Jakarta

Rini, Jacinta, *Memupuk Rasa Percaya Diri*, Internet Jakarta 16 Oktober 2002

Tamasy, Robert, *Sisi Negatif Upaya Memperlihatkan Keunggulan Diri*, Internet Jakarta 16 Oktober 2002

Tim, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi Revisi, UNESA Surabaya .

Ubaydillah, *Antara Kompetisi dan Kongkurensi*, Internet Jakarta 20 Oktober 2003.

http://www.habibiecenter.or.id, 13 Maret 2008

*Undang-Undang Otonomi Daerah* ( UU. No. 32 dan 33 Tahun 2004) ,Citra Umbara: Bandung.

J. Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta: Bandung.

Wasistiono, Sadu, 2002, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media : Bandung.

Wasistiono, Sadu dan Ondo Riyani, 2001, *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah*, Pusat Kajian Pemerintahan STPDN: Bandung.

Widodo, Joko, 2001, Good Governance : *Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia: Surabaya.

www. Andriwongso.com , 2008, *Memaksimalkan Potensi Diri,Action Wisdom Motivation Training.*

www. Andriwongso.com , 2008, *Aktualisasi Potensi Diri, Action Wisdom Motivation Training.*

Sarundajang,1997, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Syaukani, Affan Gaffar dan Ryass Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan*: Yogyakarta

Winataputra, Udin, 1999, *Apa dan Bagaimana Pendidikan Kewarganegaran menuju Suatu Paradigma Baru*, Makalah, Dirjen Dikdasmen, Depdiknas : Jakarta.

Suprapto,dkk, 2005, *Kewarganegaraan Kurikulum 2004 Kelas 3 SMA*,

PT Bumi Qaksara, Jakarta

# Glosarium

| | |
|---|---|
| **Akulturasi** | penyesuaian diri |
| **Anak lantib** | anak yang berbakat |
| **Ancaman** | setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. |
| **Ancaman tradisional** | yaitu ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. |
| **Ancaman non-tradisional** | yaitu yang dilakukan oleh aktor non - negara. Berupa aksi teror, perompakan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotik dan obat obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan. |
| **Asimilasi** | perpaduan, percampuran yang harmonis, penerimaan yang merata |
| **Bangsa** | sekelompok manusia yang memiliki persamaan nasib, sejarah dan cita-cita bersama |
| **Bebas aktif** | kebebasan poltik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa memihak kepada suatu bangsa |
| **Block Grant** | pemberian bantuan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, baik dalam bidang pendidikan, pembangunan sosial politik, hukum atau pembangunan aspek lainnya dengan tujuan untuk mempercepat laju pembangunan. |
| **Buku putih pertahanan** | pernyataan kebijakan pertahanan secara menyeluruh yang diterbitkan oleh Menteri dan disebarluaskan ke masyarakat umum, baik domistik maupun internasional |

| | |
|---|---|
| | untuk menciptakan saling percaya dan meniadakan potensi konflik. |
| **Desentralisasi** | transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat ke pemerintahan di daerah |
| **Dinamis** | selalu bergerak mengikuti perkembangan jaman |
| **Globalisasi** | saling keterkaitan diantara berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi,sosial budaya, poltik dan hankam |
| **Imperialisme** | paham untuk menguasai |
| **Interaksi** | saling hubungan satu dengan yang lain |
| **Inovatif** | memperkenalkan sesuatu yang bersifat pembaharuan |
| **Isolasi** | menutup diri |
| **Jender** | konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan |
| **Kapitalisme** | paham yang lebih mengutamakan modal dan tidak memperhatikan etika dan moral |
| **Keadaan darurat** | adalah situasi dan keadaan yang kalau dibiarkan akan mengakibatkan kekacauan keamanan dan kerugian negara yang lebih besar sehingga perlu segera mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman militer dan/ ancaman bersenjata guna menyelematkan kepentingan nasional. |
| **Kebijakan Publik** | Semua kebijakan, yang berkaitan dengan hukum maupun, peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang |
| **Kepentingan Nasional** | kepentingan dalam mencapai tujuan nasional suatu bangsa |
| **Ketahanan Nasional** | kondisi dinamis suatu bangsa dalam menjaga ekistensi/ keberadaan dirinya |

| | |
|---|---|
| **Kolonialisme** | paham untuk menjajah |
| **Komparasi** | membandingkan dengan orang lain |
| **Konkurensi** | mengalahkan orang lain/musuh |
| **Kreatif** | upaya memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan suatu hal |
| **Masyarakat** | kondisi masyarakat yang ditandai terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman. |
| **Motivasi** | dorongan yang dapat menggugah potensi seseorang untuk berprestasi |
| **Norma** | aturan yang berlaku dalam masyarakat |
| **Oportunis** | sikap yang hanya mendasarkan pada perhitungan laba dan rugi, dan tidak berdasarkan cita-cita hukum |
| **Otoriter** | menggunakan kekuasaan dengan cara sewenang-wenang |
| **Otonomi** | Otonomi berasal dari kata auto yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti rumah tangga, jadi otonomi adalah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri. |
| **Pengabdian sesuai profesi** | adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lain. |
| **Pertahanan Negara** | segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara, keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguanterhadap keutuhan bangsa dan negara |
| **Politik Luar Negeri** | merupakan perpaduan dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas |
| **Potensi** | kemampuan yang terpendam pada diri setiap orang |

| | |
|---|---|
| **Portofolio** | kumpulan dokumen yang, merupakan hasil rekam jejak terhadap hasil karya siswa yang terseleksi sesuai dengan kepentingan mata pelajaran |
| **Prestasi diri** | suatu kebanggaan yang telah dimiliki/diraih oleh suatu individu/kelompok/bangsa |
| **Publik** | masyarakat banyak/umum, fungsi publik adalah fungsi untuk melaksanakan urusan kepentingan masyarakat banyak |
| **Rekam Jejak** | hasil kegiatan atau aktivitas siswa yang dikumpuilka secara selektif. |
| **Reshuffle** | perombakan/perubahan susunan |
| **Sentralisasi** | Segala urusan yang menyangkut rumah tangga daerah diatur oleh pemerintah pusat, daerah tinggal melaksanakan |
| **Sportif** | berani mengakui kekalahan dan kesalahan Keamanan dan ketertiban |
| **Teritorial** | penyesuaian diri |
| **Transfer** | pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan di daerah |
| **Unik** | berbeda dengan lainnya |
| **Upaya pembelaan Negara** | sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. |

# Index

# Pendidikan Kewarganegaraan



Untuk SMP

Kelas IX
Edisi 4

ISBN .....

Buku ini dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No..... Tahun 200... tanggal..... 200... tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.